

Selama ini terdapat jarak antara rakyat (konstituen) dengan utusan mereka di DPRD, konstituen umumnya merasa wakil mereka mengabaikan aspirasi mereka, dilain pihak, masih banyak anggota Dewan yang merasa bahwa mereka sudah berusaha dengan gigih, namun tidak lagi mengerti bagaimana melakukannya dengan efektif.

Dengan membaca dan mencoba menerapkan petunjuk buku saku ini diharapkan 'jarak' semakin dekat dan hubungan antara anggota DPRD dengan konstituennya semakin dekat. Buku saku ini mengulas tentang teknik memetakan konstituen, bagaimana memosisikan konstituen, bagaimana berkomunikasi dengan konstituen, bagaimana memetakan konflik sosial dan mediasinya, serta bagaimana merencanakan kunjungan ke konstituen.

LGSP

www.lgsp.or.id



Seri Penguatan Legislatif

Membina Hubungan dengan Konstituen

Buku Saku DPRD

Membina Hubungan dengan Konstituen

LGSP



Local Governance Support Program

BAB I PENDAHULUAN

.....Fungsi Utama DPRD: Representasi Rakyat.....

A. Latar Belakang

Perkembangan demokrasi di Indonesia memperlihatkan adanya dorongan pada pemerintahan rakyat. Rakyat mempunyai kedaulatan yang tertinggi, dengan sistem politik yang demokratis sehingga seluruh kebijakan dan aturan yang mengikat rakyat dilaksanakan dengan persetujuan rakyat. Persetujuan Rakyat di peroleh secara langsung melalui: (1) Pemilu; (2) Referendum; dan (3) Konsultasi publik (pembuatan kebijakan partisipatif).

Persetujuan melalui perwakilan memperlihatkan adanya pendelegasian kedaulatan rakyat kepada wakil-wakilnya di parlemen yang dipilih melalui pemilu, adanya legitimasi (keabsahan) pemerintah bersumber dari persetujuan rakyat. Pengaturan kedaulatan rakyat tidak dapat dibatasi oleh pemerintah tanpa persetujuan rakyat dan pemerintahan yang konstitusional (berdasarkan, melaksanakan dan tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan) di mana kekuasaan yang dipegang oleh sejumlah pemimpin (termasuk yang dipegang oleh anggota badan legislatif) dikontrol oleh rakyat.

Kedaulatan rakyat ini harus diartikan dan diterapkan sepanjang waktu, bukan hanya ketika rakyat diperlukan, misalnya pada saat Pemilu. Artinya, ketika para wakil rakyat dan pejabat eksekutif dipilih untuk menduduki jabatan publik, dan ketika mereka memiliki hak untuk memutuskan sesuatu atas nama publik, mereka tidak boleh melupakan bahwa mereka hanyalah alat kedaulatan rakyat, dan bahwa rakyatlah tetap yang berdaulat. Dengan demikian

mereka harus memperlakukan jabatan yang diterimanya itu sebagai amanah yang kapan saja harus dikembalikan kepada pemberi mandat, yaitu rakyat, kalau mereka gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Persoalan yang lazim terjadi adalah pemahaman dan kecenderungan sulitnya membina hubungan antara legislator (anggota Dewan terpilih) dengan rakyat sebagai konstituen. Persoalan ini menjadi kendala komunikasi antara Dewan dengan rakyat yang diwakilinya, sehingga kecenderungan adanya pola hubungan yang semu menjadi semakin kuat.

Dalam masyarakat politik, yaitu sebuah arena dimana masyarakat mengorganisir dirinya untuk memperebutkan hak absah mengontrol kekuasaan publik dan aparatur negara, terdapat tiga aktor utama yang berperan aktif yaitu konstituen, partai politik dan parlemen. Yang harus dipahami secara benar oleh seorang anggota Dewan adalah bahwa ketiganya mempunyai posisi dan peran yang berbeda.

Kejelasan dan pemahaman istilah konstituen memang menjadi penting karena sering kali secara teknis sulit untuk dipetakan. Konstituen sering dimaknai sebagai rakyat biasa, pemilih di daerah pemilihan, pendukung partai politik, pemberi mandat pihak yang harus diberi tanggung jawab, masyarakat yang diwakili, atau kelompok sasaran yang harus dilayani oleh partai atau parlemen. Menurut beberapa sumber dari berbagai tulisan, istilah pemilih pendukung pada daerah pemilihan memang sering digunakan untuk menunjuk makna konstituen atas partai politik atau parlemen. Pemaknaan lebih dalam oleh partai politik, konstituen adalah pendukung yang tetap loyal, yang memilihnya dan harus ia perjuangkan.

B. Tujuan dan Kegunaan Buku Saku

Citra anggota DPRD selama ini dirasakan masih jauh dari harapan

rakyat yang memilih mereka ketika pemilu berlangsung. Rakyat (konstituen) ketika memilih wakil-wakilnya berharap utusan mereka dapat mengusung aspirasi mereka pada keputusan-keputusan publik di sidang DPRD. Di pihak lain, masih banyak anggota Dewan yang merasa bahwa mereka sudah berusaha dengan gigih, namun tidak lagi mengerti bagaimana melakukannya dengan efektif, dengan metode apa mereka harus menggali dan memperjuangkan aspirasi konstituen, bagaimana berkomunikasi dengan konstituen, dan masih banyak pertanyaan berputar-putar yang tak terjawab.

Menyadari bahwa persoalan anggota DPRD tidak hanya pada kepentingan-kepentingan partai, namun juga terdapat permasalahan penguasaan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola konstituen, maka disusunlah buku saku ini. Setelah mempelajari buku saku ini diharapkan anggota Dewan (DPRD) dapat:

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar tentang bagaimana membina hubungan dengan konstituen.
2. Memiliki pengetahuan dasar tentang prinsip-prinsip penting dalam pola hubungan.
3. Memiliki ketrampilan bagaimana menjadikan konstituen sebagai bagian dari proses kinerja Dewan yang baik.
4. Memperjuangkan kepentingan konstituen sebagai warga negara.
5. Menjadi figur wakil rakyat yang memiliki intelektualitas tinggi, aspiratif, populer, dekat dan dicintai konstituennya.

C. Siapa Pengguna Buku Saku

Pengguna utama buku ini adalah anggota DPRD (atau seringkali disebutkan sebagai anggota Dewan saja dalam buku saku ini) di daerah terutama di tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu buku saku ini dapat pula digunakan sebagai referensi oleh berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap isu-isu hubungan legislatif dengan konstituennya.

BAB II DPRD: FUNGSI DAN PERANNYA

Sumpah Jabatan anggota DPRD (UU 22/2003, tentang Susduk, pasal 72):

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (ketua/wakil ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

A. Fungsi DPRD Menurut Undang-Undang

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara, dalam UU 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, lebih jelas diamanahkan tiga fungsi DPRD kabupaten/kota yaitu:

1. **Legislasi:** kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
2. **Anggaran:** kewenangan menyetujui/menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan Rancangan APBD yang diajukan kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.

3. **Pengawasan:** kewenangan Dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Kewenangan lebih dalam adalah dalam bentuk:
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati wakil bupati atau walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
 - Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
 - Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
 - Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Peran dan Mandat DPRD

1. DPRD sebagai Lembaga Perwakilan

Peran DPRD di Indonesia masuk dalam dua bentuk perwakilan, yaitu perwakilan politik dan perwakilan fungsional. Perwakilan politik diemban melalui pemilihan umum sedangkan perwakilan fungsional dilakukan melalui pengangkatan pada saat terpilih. Perlu dipahami lebih dalam bahwa perwakilan politik harus menggambarkan dalam *hubungan perwakilan*, yang tersusun dalam suatu lembaga atau badan perwakilan, dimana si wakil bertindak sebagai wakil bagi rakyat yang diwakilinya. *Hubungan* ini akan memperlihatkan derajat keterikatan antara si wakil dengan yang diwakilinya. Hal lain, erat kaitannya dengan cara pencarian si wakil dan pelaksanaan tugas si wakil dalam rangka pelaksanaan fungsi lembaga atau adanya perwakilan tersebut.

Pakar ilmu politik *Gilbert Abcarian* mengemukakan 4 bentuk hubungan perwakilan, yaitu:

- 1) **Wali (*trustee*)**, di mana si wakil bebas bertindak atau mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan yang diwakilinya.
- 2) **Utusan (*delegate*)**, di mana si wakil bertindak sebagai utusan dari yang diwakilinya, di sini si wakil selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugasnya.
- 3) ***Politico***, di mana si wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali dan ada kalanya bertindak sebagai utusan. Tindakannya tergantung dari persoalan yang dibahas.
- 4) **Partisan**, di mana si wakil bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari organisasi politiknya. Setelah si wakil terpilih dalam suatu pemilihan umum maka lepaslah hubungannya dengan para pemilihnya dan mulailah hubungannya dengan organisasi yang mencalonkannya dalam pemilu tersebut.

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara dikenal 3 model/bentuk perwakilan, yaitu:

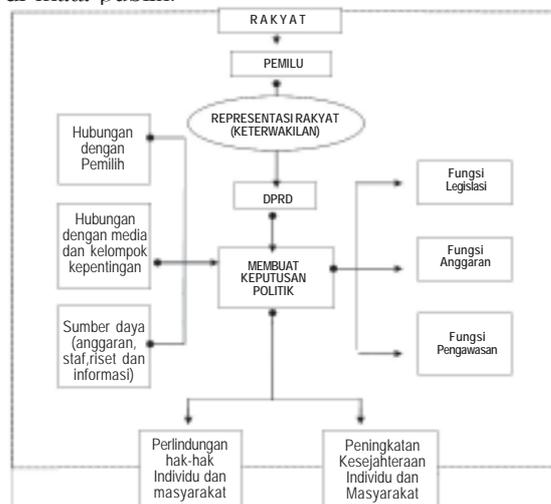
- a. **Mandat imperatif**, yang mirip dengan model utusan di atas.
- b. **Mandat bebas**, yang mirip dengan model wali di atas.
- c. **Mandat *representative***, wakil bergabung dalam suatu lembaga perwakilan. Rakyat memilih anggota-anggota lembaga perwakilan dan memberi mandat lembaga perwakilan tersebut, dan lembaga inilah yang bertanggung jawab kepada rakyat.

Perkembangan di Indonesia sejak tahun 2004, rakyat telah memilih secara langsung calon anggota legislatifnya, yang memperlihatkan bahwa kewenangan dan kekuasaan yang diperoleh anggota DPRD sebenarnya adalah kepercayaan dari rakyat yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Proses tersebut

memperkuat bahwa rakyat telah memberikan mandat politik, berupa kekuasaan perwakilan yang bersifat sementara, kepada para anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Siklus Representasi Wakil Rakyat

Mandat politik, yang berupa kekuasaan perwakilan dan bersifat temporer atau sementara, mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota-anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Misalnya, jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. Dalam jeda waktu diantara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.



Sumber: Bagan dari NDI – Jakarta, disesuaikan oleh LGSP dengan UU 32/2004 pasal 40.

D. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

Dalam pelaksanaan mandat rakyat, Dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan-keputusan politik/kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. DPRD sebagai wakil/representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-individu warga negara.

Secara substansial, pandangan dari banyak ahli dan praktisi politik, keputusan politik dapat dikatakan positif apabila mewakili dua kepentingan dasar dari individu warga negara dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, yaitu perlindungan hak dan peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek. Perlindungan hak dan peningkatan kesejahteraan merupakan kriteria umum untuk menilai apakah sebuah keputusan politik itu berdampak positif atau negatif terhadap individu dan kelompok dalam masyarakat. Semakin positif dampak sebuah keputusan politik terhadap perlindungan hak dan peningkatan kesejahteraan, maka semakin positif pula nilai keputusan politik tersebut. Begitu juga sebaliknya. Dengan demikian jelaslah bahwa anggota DPRD mutlak harus menempatkan perlindungan hak dan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan politik.

Secara prosedural, keputusan politik yang baik akan mengikuti prosedur hukum yang benar, dimana badan legislatif dan eksekutif, yang memiliki otoritas formal untuk membuat keputusan seluas mungkin, harus melibatkan masyarakat di dalam prosesnya. Jika masyarakat tidak dilibatkan maka akan memunculkan perlawanan publik terhadap kebijakan yang dibuat, dan pada akhirnya kebijakan

itu tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai bentuk konsultasi publik dan penyediaan ruang yang memadai bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat yang berkepentingan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks pembuatan keputusan politik atau kebijakan publik yang baik itulah maka anggota DPRD perlu mengembangkan komunikasi dan hubungan dengan pemilih atau konstituennya. Melalui berbagai mekanisme hubungan pemilih yang tersedia, baik formal maupun informal, maka para wakil rakyat dapat memperdalam pengetahuannya mengenai prioritas kebutuhan dan kepentingan-kepentingan konstituen dengan segenap kompleksitasnya. Bagi seorang legislator “*yang notabene tidak mempunyai keamanan pekerjaan*”, hubungan dengan pemilih dapat membantunya memastikan keberlanjutan karir politiknya pada pemilu yang akan datang.

Disamping hubungan dengan pemilih, para wakil rakyat juga perlu mengembangkan komunikasi dan hubungan dengan media serta kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat seperti serikat atau organisasi-organisasi rakyat, organisasi massa (Ormas), LSM, perguruan tinggi dan lain-lain. Hubungan dengan media akan membantu anggota DPR/DPRD dalam mengomunikasikan pekerjaan-pekerjaan yang telah, sedang dan akan dilakukannya atas nama dan demi pemilih, serta untuk memastikan para pemilih memperoleh pengetahuan tentang perkembangan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap diri mereka.

Agar anggota DPR/DPRD dapat membuat suatu keputusan politik atau kebijakan publik yang baik, maka ia harus memiliki sistem pendukung (*supporting system*) memadai. Sistem pendukung ini antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi. Secara teknis, seorang politisi hanya akan dapat membuat suatu keputusan yang baik apabila ia memiliki informasi cukup dan akurat. Oleh karena

itu, ia memerlukan staf pembantu untuk mencari, menggali, mengklarifikasi dan mengkaji informasi. Ia juga memerlukan staf yang dapat melakukan berbagai macam riset/penelitian, baik riset lapangan maupun non lapangan seperti riset pustaka atau *browsing* informasi di internet. Selain itu anggota DPRD juga perlu memiliki staf dengan berbagai bidang pekerjaan berbeda, misalnya staf administrasi, staf riset, staf hubungan dengan pemilih dan lain sebagainya. Untuk itu, anggaran dan fasilitas kerja anggota DPR/DPRD sangatlah menentukan.

Di banyak negara, anggota DPR/DPRD mendapatkan fasilitas kerja dan anggaran kerja cukup memadai sehingga mereka dapat merekrut staf profesional untuk melakukan riset dan penggalian informasi secara mendalam, serta mampu melakukan hubungan dengan pemilih secara intensif. Kini di Indonesiapun sudah waktunya anggota DPR/DPRD untuk meningkatkan kapasitas kinerjanya diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya.

BAB III

KONSTITUEN: SIAPA, POSISI DAN KEPENTINGANNYA

PADA KERJA-KERJA DPRD

A. Mengenali Konstituen

Konstituen merupakan sebutan atau istilah yang sering diperdengarkan dan dijadikan dasar landasan kerja banyak pihak. Seorang anggota DPRD akan selalu mengidentifikasi konstituennya dengan menggunakan identitas partai, dan pada umumnya bias pada kepentingan partai dari pada konstituen sesungguhnya. Bias ini menyebabkan kesulitan Dewan menjalankan fungsi artikulasi, agregasi, representasi dan akuntabilitas.

Beragam pemaknaan tentang konstituen berkisar pada konstituen sebagai rakyat biasa, pemilih di daerah pemilihan, pendukung partai politik, pemberi mandat, pihak yang harus diberi tanggung jawab, masyarakat yang diwakili, atau kelompok sasaran yang dilayani oleh partai atau parlemen. Istilah pemilih-pendukung pada daerah pemilihan tertentu memang sering digunakan untuk menunjuk makna konstituen atas partai politik atau parlemen. Tetapi makna pemilih menjadi kurang bermakna, karena akan membedakan secara tegas antara “pemilih” dan “penolak”. Pemaknaan seperti ini digunakan oleh partai politik, dimana partai selalu mengidentifikasi dengan jelas makna konstituen sebagai pendukung tetap loyal dan harus mereka perjuangkan.

Menurut Kaukus Parlemen Bersih DIY (2006), konstituen bagi anggota Dewan adalah ***“seluruh warga di daerah pemilihan, darimana dia dipilih dalam proses pemilihan umum, tanpa lagi mengidentifikasi siapa pendukung dan penolaknya”***. Pendukung setia anggota Dewan merupakan konstituen utama, tetapi warga lain bukan pendukung tentunya tidak bisa diabaikan. Pemilihan umum bukanlah arena untuk

mengidentifikasi siapa yang memilih dan menolak kandidat anggota parlemen, tetapi ia sebagai bentuk “kontrak politik” antara warga dengan kandidat di suatu daerah pemilihan. Siapapun pemenang dalam proses elektoral itu, harus mengakar, menerima mandat, mewakili dan bertanggung jawab memperjuangkan aspirasi warga (konstituen) di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Menurut Grindle (1991), warga masyarakat sebagai konstituen bukanlah entitas yang tunggal, tetapi beragam dan tersegmentasi menurut garis profesi, kelas, kelompok, kepentingan dan lain-lain. Segmentasi tersebut dapat digolongkan menjadi:

1. **Segmen akademisi:** diluar pagar pemerintah: mempunyai idealisme, teori dan keahlian dalam memahami seluk beluk kebijakan. Pendekatan dengan segmen ini menjadi sangat penting terutama sebagai mitra dalam perumusan kebijakan,
2. **Segmen mahasiswa:** dalam era reformasi, dianggap sebagai agen pendorong perubahan. Ciri khas segmen ini sangat kritis pada kebijakan parlemen dan pemerintah. Memahami segmen ini harus dengan orientasi terbuka.
3. **Segmen aktivis LSM:** sangat jelas keberpihakannya pada rakyat, mendorong adanya proses partisipasi maksimal, yaitu rakyat aktif, kritis, terorganisir dan menentukan kebijakan. Partisipasi bagi segmen ini adalah esensi dasar demokrasi dan pemberdayaan, yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan lebih terkontrol dan akuntabel.
4. **Segmen kelompok-kelompok masyarakat miskin:** sangat rentan menjadi korban kebijakan yang salah dan jauh dari proses-proses politik parlemen dan partai. Segmen ini mempunyai masalah dengan kemiskinan nyata, mereka adalah petani, nelayan, buruh, pedagang, tukang becak, pemulung dll.
5. **Segmen orang desa:** terdiri dari kepala desa, perangkat desa, maupun elite desa. Segmen ini sangat peka dan sering bersuara menghadapi kebijakan yang mengatur pemerintahan desa. Segmen ini dipentingkan oleh partai pada saat pemilihan umum, karena dianggap dapat mengerahkan massa.

6. **Segmen organisasi masyarakat:** mempunyai kekuatan konstituen yang jelas dan besar, berorientasi pada kaderisasi dan pendidikan kedalam untuk anggotanya. Segmen ini biasanya sudah beraliansi dengan partai, terutama dalam era reformasi, dimana banyak partai muncul atau terbentuk dari organisasi masyarakat dengan jumlah anggota cukup besar.
7. **Segmen warga atau rakyat biasa:** tidak tergabung dalam institusi politik, kelompok sosial atau organisasi masyarakat apapun. Jumlah segmen ini paling besar dibandingkan segmen-segmen lainnya, namun tidak secara sistematis dan terorganisir dalam merespon isu-isu publik. Bahkan dapat dikatakan bahwa warga biasa tidak mempunyai perhatian atau kompetensi memadai terhadap kebijakan publik, walaupun hampir setiap kebijakan publik berdampak langsung kepada mereka.
8. **Segmen media massa:** Media merupakan ruang publik terbuka dan aksesibel bagi pemerintah dan segmen masyarakat. Sebagai ruang publik, segmen ini adalah wadah paling memungkinkan opini atau kritik segmen lain terungkap ke publik.

Penting bagi anggota Dewan untuk memetakan segmen dari konstituennya, sehingga dapat memahami kepentingan atau aspirasi setiap segmen dan menyiapkan artikulasi warga.

B. Posisi Konstituen dalam Kerja-Kerja DPRD

Menempatkan posisi strategis konstituen dalam kerja-kerja DPRD sebaiknya dimulai dengan mempertimbangkan beberapa cara pandang kinerja Dewan dalam mengakomodasikan dan responsif terhadap hal-hal:

1. Peningkatan partisipasi warga/konstituen dalam pengambilan keputusan dan proses kebijakan.
2. Kebijakan pelayanan publik yang menjadi prioritas bagi kesejahteraan masyarakat.

MEMBINA HUBUNGAN DENGAN KONSTITUEN

3. Transparansi dan akuntabilitas di lingkungan DPRD kepada warga/konstituen.
4. Peningkatan kapasitas Dewan dalam merencanakan dan membangun kebijakan pelayanan publik dan keuangan daerah.

Berdasarkan pada cara pandang di atas, maka orientasi perubahan harus dibangun oleh seorang anggota DPRD dalam menjadikan artikulasi dan agregasi kepentingan konstituen adalah dengan cara merubah sikap orientasi dari:

- Konstituen sebagai pemilih menjadi mitra kerja yang diwakilkan
- Konsep pengendalian massa menjadi dukungan/fasilitasi bagi kerja-kerja Dewan.
- Praktik pembuatan keputusan unilateral menjadi proses partisipatif.
- Pembuatan aturan-aturan yang menghukum menjadi aturan-aturan yang merupakan penyelesaian konflik.
- Perencanaan dan penganggaran yang berorientasi penerimaan menjadi orientasi pengelolaan aset sumber daya.
- Orientasi legitimasi dari proses dan *output* kebijakan menjadi orientasi membangun proses demokrasi.
- Orientasi target dari semua aktifitas menjadi orientasi proses pelaksanaannya.
- Orientasi perencanaan pada keuntungan nasional menjadi orientasi perencanaan bagi keadilan lokal.
- Kebijakan diarahkan oleh rencana menjadi sebuah proses belajar/evolusi.



Dari perubahan orientasi di atas, maka menempatkan konstituen bukan lagi sebagai posisi subyek pada saat pemilihan umum, namun menjadikan konstituen sebagai mitra yang diwakilkan, dengan memberikan dukungan/fasilitasi secara partisipatif, melalui perumusan kebijakan yang solutif (penyelesaian konflik) serta berorientasi sumber daya, demokrasi, proses dan keadilan lokal, sebagai bagian dari proses belajar/evolusi.

C. Artikulasi¹ dan Agregasi Kepentingan² Konstituen

Dalam proses demokrasi, artikulasi dan agregasi kepentingan konstituen merupakan proses politik yang paling mendasar. Artikulasi dapat dijadikan jembatan antara warga/konstituen dengan sistem kerja-kerja DPRD dan pemerintah, sebagai pembuat kebijakan publik. Dikaitkan dengan kerja-kerja DPRD, artikulasi sebaiknya terlembagakan untuk dapat memelihara sistem demokrasi yang stabil, membangun proses legitimasi kebijakan yang sehat, mengembangkan potensi konstituen, serta membangun kepercayaan konstituen pada sistem politik di parlemen.

Kondisi terkini memperlihatkan begitu banyak aspirasi yang diartikulasikan kepada DPRD melalui JARING ASMARA (penjaringan aspirasi masyarakat), seorang anggota Dewan akan menerima banyak usulan, aspirasi, permohonan, proposal dan hal lainnya, maka proses agregasi kepentingan merupakan proses mensortir dan penentuan prioritas kepentingan yang bakal dijadikan sebagai basis formulasi kebijakan. Perlu diingat bahwa pemilahan kepentingan harus juga mengutamakan kepentingan konstituen dari pada kepentingan dari partai atau golongan.

¹ Artikulasi adalah penyaluran aspirasi warga kepada pemerintah atau pembuat kebijakan.

² Agregasi kepentingan adalah proses yang dilakukan oleh partai politik maupun parlemen untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, seleksi dan merumuskan kepentingan yang telah diartikulasikan (disalurkan) untuk menjadi bahan perumusan kebijakan.

Pendekatan artikulasi oleh DPRD dapat dilakukan berdasarkan teori partisipasi dan demokrasi, terutama jika dilihat dari sisi aktor yang memainkan peranan dominan.

1. Artikulasi kepentingan yang dilakukan secara aktif oleh warga masyarakat, atau sering disebut dengan “ruang rakyat” (*popular space*), yaitu warga masyarakat terdidik dan terorganisir, sehingga mereka mempunyai kesadaran kritis dan kompetensi terhadap masalah-masalah publik. Berbagai elemen masyarakat mengorganisir kepentingan mereka, mengumpulkan berbagai informasi publik yang terkait dengan kepentingan mereka, mempunyai peta masalah dan ide-ide alternatif untuk kebijakan, aktif merespon kebijakan publik, aktif mengawasi lembaga-lembaga publik dan lainnya.
2. Artikulasi yang dilakukan secara aktif oleh sistem politik (parlemen maupun pemerintah) dengan cara mengundang, membuka atau mendatangi warga. Biasanya “ruang diundang” (*invited space*) dilakukan dengan cara dengar pendapat di gedung DPRD, anggota Dewan melakukan jaring asmara kepada konstituen di daerah pemilihannya masing-masing, atau DPRD melakukan anjingsana kepada berbagai pihak di masyarakat. Kegiatan ini juga dilakukan pemerintah dalam bentuk sosialisasi kebijakan atau Raperda. Musrenbang adalah arena lain dari *invited space* atau arena artikulasi yang dimainkan secara aktif oleh pemerintah daerah.
3. Artikulasi yang dilakukan secara bersama dan aktif oleh sistem politik (pemerintah dan parlemen) bersama segmen-segmen warga masyarakat, dan atau disebut dengan “ruang musyawarah” (*deliberative space*). Ruang musyawarah ini diperlukan adanya ruang rakyat yang kuat, baik pengambil keputusan, maupun unsur warga masyarakat yang melakukan dialektika atau dialog secara bersama, terbuka, kritis dalam mengidentifikasi persoalan, mencari solusi pemecahan masalah, dan mengambil kesepakatan bersama, yang semuanya dapat dijadikan basis pengambilan kebijakan oleh pemerintah dan DPRD.

Agregasi aspirasi merupakan tahapan yang kompleks dan kritis, mengingat agregasi bukan hanya menampung atau menyalurkan aspirasi, tetapi juga harus membuat pilahan maupun mengelola konflik aspirasi yang kompleks dan saling bertentangan. Biasanya Dewan akan mendapatkan kesulitan dalam mengidentifikasi keinginan, kepentingan dan kebutuhan.

Dalam teori politik, terdapat proses konversi yang mengolah *input* (aspirasi) menjadi *output* dalam bentuk kebijakan. Karena itu proses dan hasil kebijakan sebenarnya merupakan tujuan utama bagi artikulasi dan agregasi kepentingan. *Output* sistem politik diharapkan oleh warga berbentuk kebijakan-kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kebijakan, apapun bentuknya, akan menghasilkan respons umpan balik menjadi artikulasi dan agregasi baru.

Oleh karena itu, proses kebijakan merupakan arena dari artikulasi dan agregasi kebijakan. Secara empirik kebijakan itu sendiri sangat beragam, yang setidaknya bisa dibagi menjadi arena: (a) kebijakan dalam bentuk perencanaan pembangunan daerah; (b) kebijakan dalam bentuk regulasi seperti Peraturan Daerah; dan (c) umpan balik dari warga dalam bentuk kasus-kasus insidental atas pembangunan dan regulasi yang dijalankan.

BAB IV MEMAHAMI NILAI-NILAI MENDAHULUKAN KEPENTINGAN KONSTITUEN

Setelah mengenal atau memetakan konstituen di masyarakat, mengubah orientasi dan memosisikannya dengan benar, serta mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya, langkah selanjutnya adalah bagaimana memahami nilai-nilai, mendahulukan kepentingan konstituen. Bab ini akan menekankan pada menumbuhkembangkan pemikiran membela hak-hak warga negara, yaitu hak-hak dasar dan prinsip mendahulukan kepentingan warga dengan mengubah pola hubungan institusional dan administratif.

Perlu diingat, aspirasi warga sebaiknya diprioritaskan pada aspirasi berdampak langsung bagi kebaikan bersama. Pada umumnya bentuk aspirasi ini mengenai masalah-masalah bersama. Konsekuensi dari prioritas ini sering harus mengorbankan keinginan maupun kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk partai.

Secara teknis DPRD dapat mengelompokkan aspirasi ini pada tingkat aspirasi politik, yakni:

1. **Terendah** adalah keinginan individu atau kelompok orang untuk keperluan jangka pendek, yakni kebutuhan isi perut dan kedudukan (ekonomi-politik).
2. **Menengah** adalah kepentingan, yakni hak-hak sosial-ekonomi-politik individu maupun kelompok masyarakat.
3. **Tertinggi** adalah kebutuhan sebagai aspirasi bersama (banyak pihak) untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki kondisi.

Dari tiga tingkatan, maka yang mendasar perlu diketahui, dihormati dan dilindungi oleh Dewan adalah hak-hak dasar warga negara, seperti diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ciri spesifik kesamaan setiap manusia adalah hak-hak dasar yang melekat dalam dirinya. Hak-hak yang dimaksud berlaku umum (*universal*), dan

dimiliki oleh manusia karena ia adalah manusia. Artinya, karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk dipersoalkan.

A. Hak-hak Dasar Warga Negara

Sebagai anggota DPRD, menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga negara merupakan syarat mutlak untuk dapat mempunyai hubungan harmonis dengan konstituennya. Pada saat warga melihat bahwa wakil-wakilnya di Dewan memiliki empati luar biasa terhadap hak-hak dasar warganya, maka pada saat itu pula telah terbangun kepercayaan hakiki antara konstituen dan anggota Dewan.

Anggota DPRD perlu mengetahui tentang hak-hak dasar EKOSOB yang tertuang dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) PBB, tertanggal 16 Desember 1966, pada Pasal 11 – 14, mencantumkan hak dasar warga prioritas, yakni kesehatan dan pendidikan, yaitu:

1. Hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus-menerus.
2. Hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional.
3. Hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.
4. Hak setiap orang atas pendidikan.

Pemerintah Indonesia menandatangani Kovenan ini, maka selayaknya anggota DPRD memahami hal ini dan mencoba mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar warganya. Hal ini dapat dilakukan dengan :

- a. Peningkatan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, pemanfaatan pengetahuan teknik dan ilmu

MEMBINA HUBUNGAN DENGAN KONSTITUEN

- pengetahuan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara efisien;
- b. Pendistribusian pasokan pangan secara adil sesuai kebutuhan.
- c. Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat.
- d. Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri.
- e. Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan.
- f. Pencapaian layanan medis.
- g. Penyediaan pendidikan dasar.

Hal ini sesuai pula dengan ketentuan penetapan hak-hak sipil dan politik wargapun dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966, diantaranya mencantumkan:

- a. Menjamin hak-hak sederajat antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik.
- b. Hak untuk hidup sebagai seorang manusia.
- c. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
- d. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dimanapun ia berada.
- e. Hak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan beragama.
- f. Hak untuk menyatakan pendapat; termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun.
- g. Hak atas kebebasan untuk berserikat.
- h. Hak dan kesempatan, tanpa pembedaan dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk : Ikut serta dalam urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; Memilih dan dipilih pada pemilihan umum; Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya.

Atas dasar pemenuhan hak-hak masyarakat inilah, para anggota DPRD “bekerja” sehingga rakyat yakin bahwa hak-haknya dijamin oleh para wakilnya dalam setiap keputusan/kebijakan yang diambil.

B. Nilai dan Prinsip Membangun Kepentingan Konstituen

Dalam memahami nilai-nilai mendahulukan kepentingan konstituen, nilai dan prinsip yang harus dibangun oleh seorang Dewan adalah:

1. Mengakui **perbedaan nilai kepentingan, kepedulian** yang berorientasi pada kebutuhan warga/konstituen.
2. **Terbuka**, pada pemikiran-pemikiran konstituen dan bukan dari format daftar isian masalah yang tidak nyata. Orientasi persoalan yang dikembangkan melalui daftar isian masalah, biasanya hanya menjadi wacana dan tidak mendasar.
3. **Kesetaraan & transparansi**: Selalu mengusahakan serta menciptakan kesetaraan dan transparansi diantara Dewan dan konstituen.
4. **Masyarakat madani/sipil**, didorong untuk lebih berperan dan bertanggung jawab.
5. Kapasitas, saling memperkuat dan **keunggulan komparatif** setiap konstituen.
6. **Introspeksi**, dan meraih pelajaran melalui kaji ulang terus menerus dan perbaikan dalam pengelolaan atau pengorganisasian.
7. **Proses lebih penting** ketimbang hasil produk jangka pendek.

Untuk membangun nilai dan prinsip di atas, alasan dasar yang harus disadari adalah pada pemahaman tentang ciri-ciri dasar manusia. Locke, dalam buku panduan Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Dewan Kabupaten dan Kota (2003), menyebutkan ciri-ciri dari manusia mencakup : (1) hak atas kehidupan, (2) kebebasan, dan (3) kekayaan pribadi. Di samping hak-hak tersebut, terdapat pula hak-hak sipil dan politik yakni: hak untuk bebas dari diskriminasi, untuk memiliki kehidupan, kebebasan, dan keamanan; untuk bebas beragama, untuk bebas berpikir dan berekspresi; untuk bebas berkumpul dan berserikat; untuk bebas dari penganiayaan dan hukuman kejam; untuk

menikmati kesamaan di hadapan hukum; untuk bebas dari penangkapan secara sewenang-wenang; untuk memperoleh peradilan yang adil; untuk mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi (privasi); dan untuk bebas bergerak. Demikian pula hak-hak lain yang terkandung dalam hak-hak sipil yang dimaksud adalah hak untuk menikah dan membentuk keluarga, untuk bebas dari perkawinan paksa, untuk memperoleh pendidikan, untuk mendapat pekerjaan, untuk menikmati standar kehidupan layak, untuk istirahat dan bersenang-senang, serta untuk memperoleh jaminan selama sakit, cacat, atau hari tua.

Berdasarkan hal di atas, aspek-aspek positif yang sebaiknya dibangun sebagai Dewan dalam menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga negara adalah memastikan orientasi kinerja Dewan pada hal-hal yang mendasar pula, yakni:

1. **Mau melayani.** Manusia”pada kebanyakan”lebih cenderung ingin dilayani, diberi hak-hak istimewa, diutamakan dan dihormati. Konteks mau melayani pada dasarnya adalah merubah kebiasaan, yang biasa dilayani pada saat-saat melakukan kunjungan, menjadi pelayan bagi warga. Perubahan ini dapat dimulai dari tindakan sederhana, misalnya menolak persiapan kunjungan istimewa dengan fasilitas berlebihan.
2. **Memandang setiap individu unik, istimewa, dan penting.** Dalam sepekan terjang sebagai wakil rakyat, seorang anggota Dewan haruslah rendah hati, memandang orang lain sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki beragam keunikan dan keistimewaan, sehingga dia senantiasa membuat orang lain merasa penting. Perlakukan warga sebagai manusia spesial, unik, dan berhak untuk dihargai. Warga sebagai manusia adalah setiap pribadi yang harus diperlakukan khusus, karena keunikan dan keistimewaannya merupakan kekayaan (aset) dalam kehidupan kelompok (bermasyarakat), terutama dalam kerja-kerja DPRD.
3. **Mau mendengar dan menerima kritik.** Salah satu sikap seorang anggota Dewan dalam kehidupan bermasyarakat (kehidupan bermusyawarah/ berdemokrasi) adalah mau

mendengar pendapat, saran, dan menerima kritik dari orang lain. Misalnya menjadi pendengar yang baik dan efektif pada saat melakukan dengar pendapat atau diskusi dengan konstituen. Mencatatnya dengan baik dan mendaftarkan aspirasi untuk diartikulasi dan diagregasikan. Sering kita mendengar pandangan bahwa Tuhan memberi dua buah telinga dan satu mulut, yang dimaksud adalah agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dengan lebih banyak mendengar, kita dapat memecahkan berbagai masalah yang sedang dihadapi. Mendengar juga berarti mau membuka diri dan menerima, suatu gambaran sifat kerelaan untuk menerima kelebihan dan kekurangan orang lain maupun diri kita sendiri.

4. **Berani mengakui kesalahan dan meminta maaf.** Sikap lain yang juga harus dimiliki seorang anggota Dewan adalah senantiasa berani mengakui kesalahan, dan meminta maaf jika melakukan kesalahan atau menyinggung perasaan orang lain. Hakikatnya manusia sangat peduli terhadap perasaan manusia lainnya. Berbeda dengan mereka yang senantiasa peduli apa kata orang lain, orang seperti itu bukan rendah hati, tetapi rendah diri. Selalu khawatir dengan apa yang dipikirkan atau dikatakan orang lain tentang dirinya.
5. **Rela memaafkan.** Dalam praktik menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD, kesalahan, dan/atau tindakan yang menyinggung perasaan tidak mungkin terhindarkan. Pertentangan pendapat, mengarah pada perseteruan atau konflik (walaupun tidak dalam konflik terbuka) menunjukkan dinamika anggota Dewan. Oleh karena itu, kerelaan untuk memaafkan sangat diharapkan pada setiap anggota Dewan.
6. **Lemah lembut dan penuh pengendalian diri.** Perubahan orientasi juga akan berimplikasi pada perubahan sikap seorang anggota Dewan, yakni sikap yang lemah lembut (*gentle*) dan penuh pengendalian diri (*self control*). Seorang anggota Dewan seyakinya tidak pernah membiarkan emosinya meledak-ledak (lepas kontrol), sikap kasar, kata-kata yang tidak baik, atau melakukan tindakan fisik. Kemarahan seharusnya ditujukan

untuk mendidik orang lain. Kemarahan atau kekecewaan yang dirasakan senantiasa dapat dikendalikan sepenuhnya, dalam arti bukan diluapkan (*expressed*), bukan pula dilupakan, diacuhkan, atau ditahan (*supressed*), tetapi dilepaskan dengan pasrah (*released*).

7. **Mengutamakan kepentingan yang lebih besar.** Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, maka tujuan Dewan yang paling utama adalah melayani kepentingan mereka yang diwakilinya. Orientasinya bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan, tetapi untuk publik. Adalah sangat terpuji membalik pola-pola lama bahwa pemimpin, wakil rakyat, dan politisi lebih menonjolkan kepentingan pribadi dan golongannya.

Orientasi kinerja di atas akan membangun sikap mengutamakan layanan kepada konstituen lebih baik, seorang anggota Dewan juga sebaiknya memperhatikan prasyarat membangun konstituen dengan beberapa hal praktis, seperti:

1. Sikap yang lebih tanggap terhadap pengetahuan dan kepentingan konstituen lebih luas.
2. Keterbukaan dalam mempresentasikan informasi yang terkumpul dan rencana kerja-kerja dan agenda DPRD.
3. Komitmen dan keinginan tulus untuk mengomunikasikan semua informasi kepada konstituen pada waktu dan sesudah pertemuan.
4. Sumber daya dan waktu yang memadai untuk berhubungan dengan konstituen.
5. Keyakinan bahwa peran serta masyarakat/warga/konstituen akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
6. Lingkup perencanaan dan penganggaran yang cukup waktu untuk melibatkan masyarakat pada tahap paling awal sehingga pengetahuan dan kepentingan mereka dapat dipadukan.

7. Mengakui informasi dan dampak informasi non teknis akan sama pentingnya, bahkan lebih penting dari pertimbangan teknis perencanaan dan pelaksanaan program.
8. Kesadaran bahwa proyek dan program sebelumnya, direncanakan sedikit melibatkan masyarakat dan tidak cukup berhasil memenuhi kebutuhan mereka.

BAB V TEKNIK BEKERJA BERSAMA KONSTITUEN

Teknik bekerja bersama konstituen tidak akan terlepas dengan beberapa pendekatan yang harus dikuasai oleh seorang anggota Dewan. Namun sebelum memahami dan mempraktikkan teknik-teknik yang akan diurai dalam bab ini, beberapa ciri pendekatan dasar pemahaman seorang Dewan, yakni:

- **Pluralistik**, yang menjadi dasar untuk membuka *mindstream* (pengarusutamaan) akan keberagaman di masyarakat. Menghormati keberagaman masyarakat akan mempermudah seorang anggota Dewan melakukan pendekatan, yang lintas batas kepentingan dan kelompok di masyarakat, terutama pada saat dihadapkan pada persoalan konflik sosial.
- **Prioritas pada kebutuhan hak dasar**, menjadi ciri dalam memprioritaskan kepentingan warga lebih dari kepentingan partai dan golongan tertentu.
- **Mengutamakan proses perubahan politik dan budaya** dalam kerja-kerja anggota Dewan, lebih dari pencapaian target pekerjaan proyek partai untuk menghabiskan anggaran.
- **Menjadikan kepentingan warga menjadi kepentingan bersama**, sehingga dalam menyusun daftar isian masalah, orientasi pada artikulasi dan agregasi kepentingan warga/konstituen akan menjadi materi dasar.
- **Berorientasi pada proses belajar dan kerjasama**, merupakan ciri untuk menjadikan konstituen sebagai mitra aktif dalam kerja-kerja Dewan. Sebagai sebuah proses belajar, maka ciri utamanya adalah membuka akses partisipasi masyarakat dalam semua proses kerja-kerja Dewan, terutama berkaitan dengan proses perumusan kebijakan publik.
- **Pilihan solusi**, memberikan pilihan-pilihan alternatif solusi akan menjadikan kerja-kerja Dewan pada wilayah pola hubungan yang sehat dengan konstituen.

- **Menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi semua.** Hal ini akan memperlihatkan ciri kerja-kerja dengan membuka peluang berkolaborasi ketimbang berkompetisi.
- **Membuka ruang negosiasi** yang sehat terhadap persoalan-persoalan publik.
- **Mengombinasikan pengetahuan, *scientific* dengan pengetahuan lokal,** terutama dalam mengkritisi dan mempertimbangkan substansi kebijakan publik.

A. Tehnik Memetakan Konstituen

Cara yang sederhana untuk mengenali dan memetakan konstituen adalah dengan dua pendekatan, yakni:

1. **Pendekatan ruang**, untuk menyebut daerah pemilihan. Pemetaan dengan pendekatan ruang ini dapat dengan sederhana menggunakan pemetaan “Bawang Berlapis” (lihat dalam Box 1), dan juga pemetaan dengan “kuadran kedekatan” (lihat dalam Box 2).
2. **Pendekatan segmentasi**, untuk menunjuk segmen-segmen yang beragam di dalam warga negara. Setiap segmen mempunyai kepentingan terhadap sektor-sektor tertentu dalam pemerintahan dan pembangunan. Segmen juga berarti sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pendekatan ini akan lebih mudah jika seorang anggota Dewan (kadang kala melalui partainya), sudah memahami segmen-segmen sesungguhnya. Pemetaan ini dapat menggunakan analisis *stakeholder*, yaitu pendekatan dengan melakukan pemetaan sosial kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat.

Langkah penting bagi anggota Dewan, setelah dapat menentukan konstituen adalah dengan menggunakan dua pendekatan di atas, artinya mengkombinasikan dua pendekatan melalui tahapan:

1. Lakukan pemetaan dengan menggunakan kombinasi pendekatan ruang dan segmen. Pilihlah metode yang paling

- cocok dengan kondisi lapangan dan kebijakan partai.
2. Identifikasikan siapa segmen-segmen warga masyarakat¹. Taruhlah setiap segmen pada lingkaran atau kuadran yang sudah dibuat pada langkah (1) di atas. Pemetaan untuk memerankan amanah keterwakilan, artikulasi dan agregasi kepentingan.
 3. Pahami apa “kepentingan” atau aspirasi politik setiap segmen yang berada dalam lingkaran I atau Kuadran I dan II.
 4. Siapkan dan jalankan “bagaimana” mengartikulasikan kepentingan warga/konstituen tersebut.

Boks 1: Pendekatan Ruang dengan Bawang Berlapis



Pemetaan dengan menggunakan metode bawang berlapis, cukup sederhana yaitu dengan merinci nama daerah atau wilayah yang berada pada lingkaran-lingkaran sebagai berikut:

- **Lingkaran I**, yaitu daerah pemilihan utama di tingkat kabupaten/kota yang akan menjadi fokus area bagi seorang anggota Dewan dalam memetakan segmen konstituen sesungguhnya. Petakan wilayah kecamatan dan desa yang menjadi basis pendukung dan pemilih pada saat pemilu berlangsung, artinya seorang anggota Dewan mendapat banyak suara pada saat pemilu dilakukan. Jika berhasil memetakan

³ Lihat kembali Bab III tentang segmen-segmen di masyarakat.

ruang dalam lingkaran I ini, maka seorang Dewan dapat mempunyai gambaran apakah di daerah inti pemilihan, seorang anggota Dewan memiliki basis konstituen yang cukup kuat.

- **Lingkaran II**, yaitu di luar daerah pemilihan, namun secara geografis mempunyai prospek dan dampak dari kebijakan di daerah dimana anggota Dewan berada; dan/atau wilayah konstituen/ kader partai atau para pendukung Dewan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rincilah daerah-daerah yang berada pada lingkaran II, untuk dapat memastikan wilayah yang akan terkena dampak kebijakan DPRD, serta memiliki prospek binaan konstituen luar bagi partai.
- **Lingkaran III**, yaitu wilayah strategis penguatan, kaderisasi dan penyebarluasan visi dan misi partai dan/atau wilayah strategis untuk replikasi kebijakan publik yang baik. Rincilah daerah-daerah yang berada pada lingkaran ini untuk mendapatkan pemetaan daerah dukungan bagi partai dan penyebaran visi dan misi kepentingan konstituen.
- **Lingkaran IV**, yaitu daerah pada wilayah tingkat provinsi.

Boks 2: Pendekatan Ruang dengan Kuadran Kedekatan

<p>KUADRAN I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daerah pemilihan dengan jumlah yang memilih di atas 60% - Daerah dominan basis pemilih dari partai - Daerah basis organisasi masyarakat pendukung partai dalam pemilu - Daerah dengan tingkat partisipasi dalam pemilu diatas 60% 	<p>KUADRAN II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daerah pemilihan dengan jumlah yang memilih antara 40% - 60% - Daerah dominan basis pemilih dari partai - Daerah basis organisasi masyarakat pendukung partai dalam pemilu - Daerah dengan tingkat partisipasi dalam pemilu antara 40%-60%
<p>KUADRAN IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daerah pemilihan dengan jumlah yang memilih di bawah 40% - Daerah bukan basis pemilih partai - Daerah bukan basis organisasi masyarakat pendukung partai dalam pemilu - Daerah dengan tingkat partisipasi dalam pemilu di bawah 40% 	<p>KUADRAN III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daerah pemilihan dengan jumlah yang memilih antara 40% - 60% - Daerah basis pemilih dari partai - Daerah bukan basis organisasi masyarakat pendukung partai dalam pemilu - Daerah dengan tingkat partisipasi dalam pemilu antara 40% - 60%

Pemetaan dengan menggunakan Kuadran Kedekatan memberikan penjelasan lebih rinci, karena pendekatan ruang menggunakan ciri-ciri dalam kuadran I sampai dengan IV. Metode pemetaan ini menghasilkan kesimpulan ruang dan segmen konstituen yang sesungguhnya dari Dewan.

- **Kuadran I** memperlihatkan wilayah warga pendukung utama dan fokus area konstituen sesungguhnya. Oleh karena itu, rincilah segmen-segmen masyarakat yang berada dalam kuadran ini, lalu petakan representasi dan artikulasi setiap segmen serta agregasikan kepentingannya. Fungsi representasi penting agar seorang anggota Dewan dapat memastikan dengan siapa dan bagaimana komunikasi dibangun secara efektif. Jika banyak desa dan segmen masuk dalam kuadran I, maka bisa dipastikan bahwa proses dan hubungan Dewan dengan konstituennya akan berjalan lancar, karena dukungan sepenuhnya akan didapat oleh konstituen yang berada dalam kuadran ini. Dari sudut pandang partisipasi, pada kuadran ini memperlihatkan adanya kesadaran warga dalam berpartisipasi aktif pada proses politik kebijakan di daerah.
- **Kuadran II** memperlihatkan wilayah konstituen kuat, area ini merupakan basis pemilih dan organisasi masyarakat pendukung partai dalam pemilu. Namun pada kuadran ini tingkat partisipasi dalam pemilu sedang saja. Artinya seorang anggota Dewan harus memperhatikan basis konstituen ini pada level partisipasinya. Selain merinci segmen pada kuadran ini, penting juga dilakukan pemetaan alasan dasar adanya tingkat keikutsertaan warga yang hanya mencapai 40% sampai dengan 60%. Penting untuk mengetahui seberapa tinggi level partisipasinya pada proses-proses politik kebijakan di daerah dan prospek ke depan.
- **Kuadran III** memperlihatkan wilayah konstituen sedang (tidak cukup kuat), walaupun wilayah ini adalah basis dari partai, namun tidak terlembaga dalam bentuk organisasi masyarakat, sehingga bukan daerah basis organisasi masyarakat pendukung partai dalam pemilu. Di kuadran inipun, tingkat

partisipasi dalam pemilu tidak tinggi, sehingga pada kuadran ini, seorang anggota Dewan harus mempunyai strategi khusus dalam melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan konstituen.

- **Kuadran IV** akan memperlihatkan daerah yang sangat rawan bagi seorang anggota Dewan, karena basis konstituennya tidak kuat, serta tingkat partisipasi dan keikutsertaan warga/konstituen dalam proses politik sangat rendah. Untuk wilayah kuadran ini, sebaiknya seorang anggota Dewan membuat strategi bersama partainya atau kelompok pada segmen terpilih, untuk meningkatkan level partisipasi warga dalam proses-proses politik.

Praktik politik yang terjadipun, seringkali menjebak Dewan pada wacana sulit untuk membedakan antara artikulasi aspirasi rakyat (konstituen) versus opini publik dari sekelompok elit warga atau pengamat politik. Jika anggota Dewan tidak bisa memposisikan dengan benar tentang siapa konstituen, kepentingan dan kebutuhannya, maka artikulasi dan agregasi kepentingan tidak mungkin dapat dipetakan.

Pada kondisi ini anggota Dewan akan dihadapkan pada aspirasi yang begitu banyak dan dari berbagai segmen dalam wilayah utama atau *focus area*, terutama apabila pada masa kampanye pemilihan sebelumnya, telah banyak janji-janji politik antara partai yang menaunginya dengan pemilih. Disinilah agregasi aspirasi berperan sebagai tahapan yang kompleks dan kritis, bukan hanya menampung atau menyalurkan aspirasi, tetapi harus membuat pilihan maupun mengelola konflik yang ditimbulkan akibat adanya pertentangan atau perbedaan antar segmen. Anggota Dewan akan dihadapkan pada persoalan untuk mengidentifikasi dan membuat pilihan antara keinginan, kepentingan dan kebutuhan. Dimana kekuatan politik juga bermain dan berupaya mempolitikasi agar keinginan segmen atau kelompok tertentu menjadi kepentingan bahkan kebutuhan.

Apabila pemetaan konstituen dengan menggunakan pendekatan di atas, maka metode yang paling mungkin dilakukan oleh anggota Dewan adalah dengan melakukan beberapa pendekatan untuk memastikan tentang artikulasi konstituen sebenar-benarnya, yaitu:

1. **Pendekatan obyektif**, melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak berkepentingan guna memperoleh informasi dan posisi mengenai aspirasi secara lebih memadai.
2. **Pendekatan subyektif-berpihak**, menggunakan perspektif berbasis hak (*right based approach*) dan perspektif gender untuk menunjukkan keberpihakan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang dirugikan, terpinggirkan atau tertindas.
3. **Pendekatan teknokratis**, yakni menghadirkan narasumber berkompeten (ahli) pada isu yang diperdebatkan untuk memperoleh informasi lengkap, netral dan obyektif.
4. **Pendekatan demokratis**, melakukan negosiasi untuk mencari titik konsensus (kompromi) yang lebih elegan.

Keempat pendekatan di atas sebaiknya dapat dipertimbangkan dan dipergunakan secara bersama-sama untuk mengelola aspirasi yang beragam sebagai titik awal untuk mengambil keputusan. Tentu saja menggunakan seluruh pendekatan di atas juga bisa bertele-tele, oleh karena itu perlu juga strategi situasional, yaitu secara peka melihat situasi yang berkembang dan kemudian menggunakan pendekatan tertentu yang tepat. Selain itu perlu diantisipasi kondisi dimana setiap aspirasi yang saling pertentangan dapat bermuatan politik, sehingga pendekatan demokratis merupakan akhir pendekatan yang harus dilakukan.

B. Bagaimana Menempatkan Peran dan Posisi Konstituen

Teori sistem politik memperlihatkan adanya konversi dari *input* (aspirasi) menjadi *output* dalam bentuk kebijakan. Karena itu proses dan hasil kebijakan sebenarnya merupakan tujuan utama bagi artikulasi dan agragasi kepentingan. *Output* sistem politik diharapkan

oleh warga/konstituen berbentuk kebijakan-kebijakan untuk menjawab kebutuhan warga. Kebijakan, apapun bentuknya, akan menghasilkan umpan balik, menjadi artikulasi dan agregasi baru. Umpan balik akan lebih keras, bahkan dapat bernuansa konflik, jika kebijakan tidak sesuai dengan aspirasi konstituen.

Karena itu proses kebijakan merupakan arena utama proses artikulasi dan agregasi kepentingan. Secara empirik kebijakan itu sendiri sangat beragam, setidaknya bisa dibagi menjadi tiga arena: (a) kebijakan dalam bentuk perencanaan pembangunan daerah, (b) kebijakan dalam bentuk regulasi seperti peraturan daerah, dan (c) umpan balik dari warga/konstituen dalam bentuk kasus-kasus insidental atas pembangunan dan regulasi.

Ketiganya bisa disusun prosedur standar artikulasi dan agregasi kepentingannya, yang di dalamnya DPRD dapat memainkan peran.

Langkah selanjutnya adalah bagaimana menempatkan peran dan dan posisi konstituen dalam kerja-kerja anggota DPRD. Secara umum langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh seorang anggota Dewan adalah:

1. Pastikan telah dilakukan pemetaan ruang dan segmen konstituen; pengelompokan aspirasi politik dari masing-masing segmen; artikulasi dari aspirasi politik dan agregasi kepentingan dari masing-masing segmen.
2. Padukan hasil agregasi kepentingan konstituen dengan fungsi-fungsi kerja DPRD, yaitu:
 - a. **Legislasi:** kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/ menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. Pada fungsi ini, agregasi kepentingan konstituen, terutama solusi dari persoalan berkaitan dengan pelayanan publik dapat dilakukan melalui proses perumusan kebijakan secara partisipatif. Dalam konteks substansi, pastikan bahwa rancangan kebijakan yang akan dan

sedang disusun, merupakan solusi dari masalah, artikulasi politik dan aspirasi konstituen dan agregasi kepentingan konstituen. Ruang partisipasi masyarakat/konstituen harus dibuka, mulai dari identifikasi masalah, inisiasi kebijakan, *legal drafting* sampai pada implementasi kebijakannya.

Peran konstituen dalam proses ini adalah sebagai mitra Dewan, mereka akan memastikan artikulasi dan agregasi kepentingan konstituen telah diakomodasikan dan menjadi landasan sebuah kebijakan anggota Dewan. Posisikan konstituen sebagai mitra dalam pentahapan proses *legal drafting*. Dengan berbedanya segmen dari konstituen, maka Dewan dapat memposisikan konstituen sesuai dengan pentahapan dan tingkat partisipasinya. Sebagai contoh, segmen akademisi, dapat diserahkan peran untuk menyusun naskah akademik dalam proses *legal drafting*. Posisikan mereka sebagai tenaga ahli yang membantu merumuskan pijakan akademik pada rancangan kebijakan. Segmen aktivis LSM dapat diposisikan sebagai mitra kritis kerjakerja DPRD, terutama untuk melihat level partisipasi, transparansi dan akuntabilitasnya. Segmen organisasi masyarakat, dapat diposisikan sebagai mitra stimulan masukan-masukan dari warga, untuk memastikan artikulasi dan agregasi kepentingan konstituen. Segmen kelompok masyarakat miskin sebaiknya diposisikan sebagai penerima manfaat paling besar dari produk kebijakan Dewan, sehingga peranan mereka sebagai mitra aktif dalam pembahasan substansi dan buka akses mereka pada proses perumusan kebijakan.

- b. **Anggaran:** kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh Kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.

Pada fungsi ini, proses anggaran merupakan keterpaduan antara proses teknokratik dan politik. Keberpihakan pada kepentingan konstituen akan tercermin dalam kerja-kerja Dewan pada proses anggaran. Kewenangan anggaran Dewan sangat strategis dalam mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya dalam arah kebijakan umum anggaran daerah. Dalam proses pembahasan anggaran yang diusulkan oleh kepala daerah, seorang anggota Dewan dapat memasukkan kepentingan konstituen yang sudah dirumuskan dalam program pada anggaran satuan kerja pemerintah.

Pada proses anggaran ini penting membuka akses konstituen pada proses perencanaan, penyusunan dan negosiasi kebijakan anggaran. Anggota DPRD yang menjadi bagian panitia anggaran penyusunan APBD, memiliki posisi strategis untuk dapat memasukkan agregasi kepentingan konstituen pada perencanaan anggaran. Hal yang paling krusial dalam proses ini adalah memasukkan anggaran program-program pelayanan publik pada proses perencanaan anggaran.

Gunakan semua ciri dan prinsip dasar yang telah dipaparkan sebelumnya pada proses pemberian peran dan fungsi dari konstituen. Representasi dari masing-masing segmen, seperti segmen akademisi, aktivis LSM dan organisasi masyarakat, biasanya adalah kelompok yang sangat kritis pada kebijakan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. Segmen ini sebaiknya dapat dijadikan mitra DPRD dalam mengkritisi proses perencanaan dan dokumen anggaran yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Segmen ini jangan dibiarkan menjadi lawan kerja-kerja Dewan karena akan kontra-produktif. Mereka akan menjadi mitra yang bagus untuk menelusuri proses dan alokasi anggaran yang dapat mengakomodasikan kepentingan warga/konstituen.

Segmen atau kelompok miskin kota dan rakyat biasa adalah segmen yang sangat rentan pada dampak dari perencanaan anggaran yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat atau kelompok miskin. Mereka adalah kelompok yang tidak memiliki akses pada kerja-kerja Dewan dan pemerintah daerah di anggaran. Seorang Dewan harus dapat membukakan akses dan mendahulukan kepentingan segmen ini dalam pengalokasian anggaran.

- c. **Pengawasan:** kewenangan Dewan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemda dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

Pada fungsi ini, seorang anggota DPRD dapat memainkan peran sebagai *public services watch* bagi pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah sangat rawan pada diindahkannya kepentingan publik. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi ini, DPRD harus turut serta mengajak konstituennya sebagai mitra dalam menjalankan fungsinya.

Berbagi peranlah dengan konstituen, sesuai dengan fungsi dari segmen-segmen di masyarakat. Seorang Dewan harus dapat memberikan peran yang tepat pada semua segmen, sehingga akan terlihat bahwa seorang anggota Dewan memiliki kerja tim yang berasal dari konstituennya.

selanjutnya, mulailah dengan membuka akses dan membangun mekanisme partisipasi, transparansi dan tanggung gugat pada saat Dewan menjalankan fungsi di atas. Hal ini untuk memastikan bahwa Dewan dapat menjalankan mandat konstituennya dengan benar. Penempatan peran dan fungsi konstituen yang ada akan mempermudah kerja-kerja Dewan.

Dan terakhir, pastikan apa yang dilakukan pada proses-proses tersebut terdokumentasi dengan baik. Mintalah fasilitas dari sekretaris DPRD (sekwan) berupa staf yang selalu ikut serta dalam proses yang dibangun oleh Dewan.

C. Teknik Komunikasi Efektif dengan Konstituen

Beberapa persoalan yang sering timbul seputar hubungan DPRD dan konstituennya adalah akibat langsung dari kegagalan berkomunikasi. Kegagalan dalam berkomunikasi dapat disebabkan oleh banyak hal. Komunikasi adalah pertukaran dan aliran informasi dan ide dari satu orang kepada yang lain. Komunikasi dalam prakteknya melibatkan seorang yang mengirimkan pesan dan seorang penerima. Komunikasi yang efektif terjadi hanya jika penerima mengerti informasi atau ide yang diterima dengan pengertian yang sama dengan pengirim. Komunikasi adalah rantai yang mempersatukan para pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan.

Faktor-faktor dalam proses berkomunikasi adalah pesan berupa **informasi, fakta atau kata-kata; Pengirim** baik individu, kelompok, organisasi atau masyarakat dan **Penerima** baik individu, kelompok, organisasi atau masyarakat. Sepanjang proses penyampaian pesan, dua proses akan diterima oleh penerima yaitu isi dan konteks. Isi pesan adalah kata atau simbol yang digunakan dalam pesan. Konteks adalah cara penyampaian atau bagaimana pesan tersebut disampaikan seperti tekanan kata, pandangan, bahasa tubuh, ekspresi perasaan (marah, khawatir, ragu, rendah diri, dll).

Banyak anggota DPRD berpikir bahwa mereka telah berkomunikasi dengan konstituennya ketika melakukan kunjungan sesaat ke suatu daerah. Sangat umum konstituen yang dikunjunginya tidak mengerti pesan yang disampaikan. Sebuah pesan belum dikomunikasikan jika pesan tersebut tidak dimengerti oleh penerima. Bagaimana untuk mengetahui bahwa pesan tersebut telah diterima? Kuncinya adalah dengan komunikasi dua arah dan umpan balik.

Gambar 1. Proses Komunikasi Pengirim (Konstituen) dan Penerima (Dewan)



Untuk mencapai kemampuan berkomunikasi, setiap komunikator harus memahami beberapa komponen proses berkomunikasi yang diperlihatkan pada gambar berikut.

Biasanya Dewan melakukan komunikasi satu arah dan lebih senang berbicara daripada mendengar. Kita terbiasa untuk berbicara, tetapi kita jarang dilatih untuk mendengar. Mendengar juga perlu dilatih. Bagi seorang anggota DPRD, sangat penting untuk menjadi pendengar yang baik. Bagaimana Dewan melatih dirinya

mendengar dan merespon dengan cara yang menjamin bahwa konstituen akan membuat keputusan sendiri dan menangkap pesan sendiri? respon yang paling efektif dalam sebuah komunikasi adalah dimana penerima menunjukkan ketertarikan kepada pengirim sebagai pribadi, memahami apa yang telah dikatakan dan mendorong pengirim untuk meneruskan, mengelaborasi dan menggali topik selanjutnya.

Mendengar dapat dikategorikan menjadi dua bagian: *Pertama*, mendengar sebagai aktivitas fisik. Dalam hal ini mendengar adalah kegiatan menerima bunyi atau secara sederhana merujuk pada penerimaan rangsangan oleh anggota tubuh. *Kedua*, mendengar sebagai tindakan yang melibatkan penerimaan dan interpretasi bunyi kedalam pengertian. Mendengar dalam pengertian ini juga dapat dibagi menjadi dua kategori: Mendengar aktif dan mendengar pasif. Mendengar terjadi ketika penerima memiliki motivasi yang rendah untuk benar-benar mendengar, seperti dalam musik, cerita, televisi atau untuk menjaga sopan santun. Mendengar aktif dalam sisi lain, melibatkan upaya mendengar dengan tujuan seperti untuk mendapatkan informasi, mendapatkan arah, memahami orang lain, memecahkan masalah, berbagi pengalaman menarik, mendengarkan keluhan orang lain, atau menunjukkan dukungan. Ini memerlukan bahwa pendengar masuk ke dalam kata-kata dan perasaan pengirim untuk benar-benar dapat memahami. Hal ini memerlukan energi yang sama atau bahkan lebih besar dari berbicara. Penerima perlu mendengar berbagai pesan, mengerti maksudnya, dan kemudian menguji/memeriksa pemahamannya dengan memberi umpan balik.

Berikut beberapa sifat dari pendengar yang baik:

1. Menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendengar daripada berbicara.
2. Tidak menghentikan/memotong kalimat orang lain.
3. Tidak menjawab pertanyaan dengan pertanyaan.
4. Memperhatikan bias pada saat komunikasi sedang dilakukan.

5. Tidak menghayal atau sibuk dengan pikiran sendiri ketika orang lain berbicara.
6. Membiarkan orang lain berbicara. Tidak mendominasi pembicaraan.
7. Merencanakan respon ketika orang lain selesai berbicara dan tidak pada saat orang tersebut bicara.
8. Memberikan umpan balik tetapi tidak dengan terus-menerus memotong.
9. Menganalisis dengan melihat seluruh faktor yang relevan dan bertanya dengan pertanyaan terbuka.
10. Membiarkan pembicaraan tetap dalam apa yang dikatakan pembicara, tetapi TIDAK dalam hal yang menarik bagi diri sendiri.
11. Membuat catatan ringkas untuk membantu konsentrasi pada apa yang telah dikatakan.

Mendengar dapat menjadi kekuatan Dewan dalam berkomunikasi dengan konstituen. Gunakanlah!

D. Teknik Memetakan Konflik Sosial di Masyarakat

Konflik menurut pandangan Kaum Strukturalis, merupakan suatu situasi proses interaksi antara dua atau lebih orang atau kelompok dalam memperjuangkan kepentingannya atas obyek atau tujuan yang sama. William Coser berpendapat bahwa perjuangan mengenai nilai dan klaim terhadap status, kekuasaan (*power*) dan sumber daya (tanah, air, dan sebagainya) dengan tujuan untuk menetralsir, melukai atau memusnahkan pesaing-pesaingnya. Selanjutnya teori konflik menurut Coser lalu dibedakan antara yang psikologis dengan yang sosiologis. Yang psikologis : penyebab terjadinya konflik bisa karena faktor rasa benci, dendam, kecewa, curiga yang apabila menumpuk, dampaknya bisa berbahaya dan semuanya itu pada taraf rasa. Sedangkan pandangan sosiologis, perbuatannya itu yang disebut konflik.

Konflik menurut Coser dibedakan atas : (1) **konflik internal** (seperti konflik antara pemimpin dan dengan anak buah), (2) **konflik eksternal** (seperti konflik antara kelompok itu sendiri melawan kelompok lain, (3) **konflik yang realistik**, yaitu konflik yang sulit diredam karena berhubungan dengan material, (4) **konflik yang non realistik**, merupakan konflik biasanya mudah (bisa) diredam karena berkaitan dengan konflik nilai. Proses peredaman konflik selanjutnya dikenal dengan sebutan katup pengaman (*"safety-valve" institution*). Contoh : rasa jengkel pada Orde Baru, oleh para seniman tidak diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa (kekerasan) tetapi dibuat dalam bentuk sandiwara, wayang, syair, puisi, dan sebagainya setelah disalurkan dan pulang hilang rasa jengkelnya.

Menurut pandangan kaum modernis, konflik lebih dipandang sebagai refleksi dari perbedaan-perbedaan yang dimiliki anggota sebuah komunitas. Perbedaan dimaksud bisa berupa perbedaan pendapat, kepentingan, minat, persepsi, keinginan, dan kemauan. Perbedaan dimaksud bukan hanya tim kerja tetapi tim apapun yang anggotanya manusia dengan satu tujuan bersama. Apapun, namanya perbedaan biasanya memberikan nuansa ketidakcocokan. Jika tidak segera diselaraskan, tentu saja nuansa tersebut akan semakin meruncing dan menjadi beban. Pada gilirannya ia akan menciptakan jurang pemisah bahkan pertumpahan darah. Konflik yang tidak tertata dengan baik dan berkepanjangan akan menjadi penghambat laju sebuah organisasi. Dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, konflik kepentingan yang tidak juga selesai membuat krisis semakin berkepanjangan dan akan menciptakan individu-individu egois, penuh curiga, cenderung menyerang.

Konflik terjadi biasanya berkisar pada masalah perebutan sumber-sumber, baik itu sumber-sumber politik (kekuasaan), ekonomi, sosial maupun kebudayaan. Biasanya juga dalam konteks satu pihak mempertahankan dan di pihak lain ada yang berusaha merebut, maupun kedua belah pihak sama-sama sedang memperebutkan. Dan konflik juga dapat memiliki spektrum masalah yang beragam

dari kecil hingga besar, dari yang sepele hingga yang penting, dari yang bersifat taktis hingga strategis, dari yang bersifat lokal hingga internasional, dari yang bersifat pribadi hingga kelompok yang besar, dari sederhana hingga yang rumit dan lain sebagainya.

Timbul adanya keyakinan bahwa seni menyelesaikan konflik adalah suatu ketrampilan yang dipelajari dengan mengalami sendiri. Semakin banyak belajar dan mengalami, maka semakin mudah mengatasi hal-hal yang berbau konflik. Kita tidak perlu menjadi biang kerok penyebab terjadinya konflik. Tidak usah menciptakan konflik. Yang jelas bahwa dalam kehidupan berorganisasi, baik organisasi modern seperti Dewan, konflik senantiasa terjadi. Setiap komponen (sub-sistem) menyumbang bagi terwujudnya konflik dan berakhir pada struktur organisasi yang stabil.

Menurut Kriesberg, ada tahapan-tahapan dalam analisis konflik yang dimulai dengan latar belakang terjadinya konflik, bagaimana konflik muncul ke permukaan, cara berlangsungnya konflik, intensitas cakupan, dan *outcome* (hasil atau akibat). Oleh karena itu, untuk melihat proses konflik, ada 5 dimensi, yaitu:

1. **Aspek kesadaran** yakni sejauh mana anggota kelompok itu secara keseluruhan sadar bahwa antara anggotanya dengan lawan terdapat ketidakadilan.
2. **Derajat intensitas**, sangat tergantung pada kesadaran, interaksi, dan kepemimpinan dalam kelompok. Tergantung pada perasaan anggota-anggota dalam kelompok itu sendiri.
3. **Sejauh mana konflik itu telah melembaga**, bagaimana lembaga-lembaga tersebut dapat mengelola konflik.
4. **Konflik murni** yaitu suatu gejala konflik apabila kelompok itu bersikap “*zero-sum*” yang penting adalah menang atau kalah, yang tidak sama dengan salah/benar.
5. **Keseimbangan kekuatan** antara kelompok/segmen, atau antara pusat dan daerah dan lainnya, yang memperlihatkan adanya transaksi kepentingan, kekuatan dan kewenangan antara pihak.

Hal-hal yang mempengaruhi konflik dalam kehidupan bernegara dan hubungan antara warga negara, akan dihadapi oleh DPRD dalam menjalankan fungsinya. Dalam hal ini, seorang anggota Dewan harus dapat mengenali dan memetakan penyebab dan akar permasalahan dari konflik yang berkembang di masyarakat. Beberapa teori yang berkaitan dengan hal ini dan teknik memetakan konflik berdasarkan pendekatan teori tersebut adalah:

D.I. Teori Hubungan Masyarakat. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah : (1) meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, (2) mengusahakan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.

Di dalam tubuh DPRD sendiri bisa terbuka peluang penilaian subyektif mengenai polarisasi secara internal antar anggota, antar anggota dengan pihak eksekutif, ataupun antar komisi, panitia khusus, kelompok kerja, dsb. Polarisasi dimaksud juga bisa berhubungan dengan kelompok masyarakat (komunitas) tertentu. Apalagi kelompok masyarakat dimaksud adalah mereka yang memiliki suara banyak untuk memperjuangkan seseorang dengan partai politiknya hadir sebagai bagian dari anggota legislatif. Harapan masyarakat inilah yang apabila tidak terjembatani dengan baik, maka akan memicu timbulnya konflik.

Teknik memetakan konflik berdasarkan teori ini adalah dengan kembali memetakan kepentingan dari semua segmen konstituen yang ada. Polarisasi yang terjadi dapat terpetakan dari kepentingan masing-masing segmen atau kelompok masyarakat. Carilah orang kunci dari kelompok atau segmen yang berkonflik. Upayakan pendekatan persuasif untuk memediasi konflik antara kelompok dalam segmen konstituen, atau antara kelompok dari segmen yang

berbeda, serta membangun komunikasi diantara mereka. Seorang anggota Dewan harus memposisikan diri sebagai mediator dan jangan menunjukkan keberpihakannya, karena dipastikan konflik meluas dan Dewan menjadi bagian dari konflik itu sendiri.

D.2. Teori Negosiasi Prinsip. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: (1) membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap, (2) melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak (semua pihak).

Perasaan pribadi terpendam dalam hati merupakan hal yang tidak mungkin dihilangkan dalam diri seseorang. Anggota DPRD-pun tidak bisa melepaskan diri dari fenomena seperti itu. Apabila ada indikasi demikian, maka dialog (komunikasi), kesadaran, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pergerakan diharapkan lebih dimainkan oleh pimpinan Dewan sendiri. Proses demikian dimaksudkan untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu sebagai sumber (pemicu) konflik.

Teknik memetakan konflik berdasarkan teori ini adalah dengan cara kembali melihat anatomi dari segmen konstituen, ciri dan prinsip-prinsip dasar apa yang diperjuangkan oleh kelompok ini, dan lakukan penelitian kepentingan dari kelompok di dalam segmen tersebut. Pastikan bahwa Dewan mempunyai catatan detil mengenai tiga hal itu, maka akan ditemukan simpul-simpul persoalan perbedaan dan persamaan antara kelompok dalam segmen dan antara segmen. Dalam kondisi ini, seorang anggota Dewan sebaiknya menjadi fasilitator untuk menemukan persamaan prinsip lebih banyak dari pada perbedaannya.

Mintalah setiap segmen atau kelompok yang berkonflik untuk menghadirkan negosiator atau pemusyawarah, pada pertemuan yang difasilitasi oleh Dewan. Upayakan bersikap senetral mungkin, dan carilah celah-celah yang memperbesar hal-hal yang disepakati bersama.

D.3. Teori Kebutuhan Manusia. Teori ini berasumsi bahwa konflik berakar dan disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia” fisik, mental, dan sosial” yang tidak terpenuhi dan dihalangi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah : (1) membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, dan (2) agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua pihak.

Kebutuhan dasar yang dimaksud tidak selalu berhubungan dengan kebutuhan fisik (ekonomi) yang tidak terpenuhi tetapi bisa berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan akan ide, gagasan, keinginan, dan sebagainya yang dinilai bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, dan memberikan kepuasan batin tersendiri bagi seorang anggota Dewan.

Teknik memetakan konflik berdasarkan teori ini adalah kembali melihat agregasi kepentingan dari kelompok-kelompok yang berkonflik. Identifikasikan kebutuhan krusial dari agregasi kepentingan. Akan terlihat bahwa peta konflik sebenarnya adalah perebutan akses dan kepemilikan sumber daya, termasuk akses pada pelayanan publik. Dalam konflik seperti ini, DPRD harus dapat melihat kembali pada fungsinya, dan mencari kemungkinan solusi konflik yang bisa ditangani oleh kerja-kerja Dewan.

D.4. Teori Identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah : (1) melalui

fasilitas lokakarya dan dialog antar pihak-pihak yang mengalami konflik, mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi, (2) meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

Konflik pada tataran empiris yang menuntut penyelesaian, kadang kala tidak ditangani secara baik. Bila pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan seperti itu adalah pemerintah, dan secara subyektif dinilai bahwa tidak diselesaikan secara baik maka hal itu akan menimbulkan luka yang dalam dan berkepanjangan karena mungkin dinilai mengancam identitas mereka. Resolusi konflik seperti ini biasanya harus ditangani secara tuntas oleh pihak eksekutif bersama-sama pihak legislatif, namun tanggung jawab untuk menyuarakan hal seperti ini secara kontinyu agar mendapat perhatian publik ada di tangan pihak legislatif.

Teknik memetakan konflik berdasarkan teori ini adalah dengan cara mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang dirasakan masing-masing kelompok atas segmen, sebagai akar persoalan. Dalam kondisi ini, carilah sumber atau penyebab ancaman dan ketakutan tersebut. Akan ditemukan kelompok-kelompok elit tertentu yang memicu konflik tersebut.

D.5. Teori Kesalahpahaman antar Budaya. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai oleh teori ini adalah: (1) menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain, (2) mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain, (3) meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya.

Teknik memetakan konflik berdasarkan teori ini adalah dengan memetakan sosial budaya dari semua segmen yang ada di masyarakat. Di dalam internal Dewan (apalagi antar eksekutif

dan legislatif) memiliki struktur heterogen. Heterogenitas dimaksud berhubungan dengan aspek ekonomi, budaya, latar belakang politik, dsb. Perbedaan-perbedaan ini apabila dipermasalahkan pada setiap kesempatan, maka hal ini berpeluang menimbulkan konflik. Tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam komunikasi dan interaksi antar berbagai pihak ada *stereotype* negatif yang secara kultural telah melembaga dan justru menonjol dalam komunikasi yang berhubungan dengan pemerintahan dan pembangunan.

D.6. Teori Transformasi Konflik. Teori ini berasumsi konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah : (1) mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi, (2) meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik, dan (3) mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, dan pengakuan.

Teknik memetakan konflik berdasarkan teori ini adalah dengan melakukan identifikasi struktur dan stratifikasi sosial yang ada di masyarakat. Pemetaan ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang simpul-simpul konflik sosial yang paling rawan di masyarakat, termasuk perebutan pada akses kelompok dalam strata sosial di masyarakat terhadap sumber daya dan besar kecilnya sumber-sumber yang diperebutkan. Jika sumber-sumber yang diperebutkan sangat penting artinya bagi pihak-pihak yang berkonflik, maka kemungkinan konflik akan intens (cukup besar), demikian sebaliknya. Juga, apabila jumlah sumber-sumber yang diperebutkan tidak bertambah/tetap, misalnya soal tanah, maka kemungkinan timbulnya konflik intens.

Terlepas dari semua teori di atas, seorang anggota DPRD dalam memetakan konflik sosial di masyarakat, haruslah dapat memahami

struktur konflik. Dalam tabel di bawah, memperlihatkan struktur konflik terbagi dua, yakni konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*), dan konflik menang-menang (*non zero-sum conflict*).

Konflik menang-kalah adalah situasi konflik yang bersifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan tercapainya suatu kompromi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sedangkan konflik menang-menang adalah situasi konflik dalam mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin untuk mengadakan kompromi dan bekerjasama sehingga semua pihak pihak yang terlibat dapat terpenuhi kepentingannya (sama-sama

Boks 3. Perbandingan Ciri Konflik

CIRI-CIRI KONFLIK MENANG-KALAH	CIRI-CIRI KONFLIK MENANG-MENANG
Tidak mungkin mengadakan kerjasama	Adanya kemungkinan kompromi atau kerjasama.
Hasil kompetisi akan dinikmati oleh pemenang saja (pihak pemenang akan mendapatkan semuanya, sedang pihak yang kalah akan kehilangan semuanya)	Hasil kompetisi akan dinikmati oleh kedua belah pihak tetapi tidak secara maksimal.
Yang dipertaruhkan biasanya menyangkut hal-hal yang prinsipil, seperti harga diri, iman dan kepercayaan, masalah hidup	

untung) atau sekurang-kurangnya tidak saling dirugikan. Yang dipertaruhkan dalam situasi ini bukanlah hal prinsipil, tetapi bukan pula hal yang tidak penting.

E. Teknik Mediasi Sengketa

Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan hal tidak

mungkin dihindari. Konflik biasanya terjadi disebabkan tidak terjembatannya harapan dan kenyataan. Harapan dan kenyataan apabila terjembatani dengan baik, maka sesungguhnya merupakan suatu tindakan yang seiring dengan konsep resolusi konflik. Demikian pula adanya kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam konteks pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya.

Menurut pemahaman kebanyakan orang, konflik selalu dipandang sebagai sesuatu yang perlu dihindari atau sebagai sesuatu yang bersifat destruktif. Namun menurut pandangan kaum Strukturalis, bahwa konflik terjadi karena ada ketidakberesan dalam suatu sistem. Agar sistem tetap berjalan secara kontinyu maka konflik tetap diperlukan untuk menata struktur yang tidak baik agar ke depan dapat berjalan dengan baik.

Pengaturan konflik yang efektif bergantung pada tiga faktor, yaitu: (1) Kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi di antara mereka (pengakuan atas kepentingan yang diperjuangkan oleh pihak lain); (2) Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasikan secara rapi, tidak tercerai berai, dan terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain; dan (3) Kedua belah pihak menyepakati aturan main (*rules of the game*) yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi di antara mereka. Jika ketiga syarat itu dipenuhi maka berbagai bentuk pengaturan konflik dapat dibuat dan dilaksanakan.

Menurut teori manajemen konflik, secara umum berurusan dengan tiga pengertian penting, yaitu:

1. Penyelesaian konflik. Merujuk pada sebab-sebab konflik daripada manifestasi (wujud) konflik. Asumsinya, selama ada antagonisme kepentingan dalam masyarakat, konflik selalu terjadi maka konflik tidak pernah dapat diselesaikan.
2. Pembasmian konflik. Merujuk pada manifestasi konflik dari

- pada sebab-sebab konflik. Dalam jangka pendek, konflik dapat dibasmi, tetapi untuk jangka panjang tidak akan dapat ditumpas. Semakin dibasmi, semakin muncul konflik.
3. Pengaturan konflik. Berupa bentuk-bentuk pengendalian yang lebih diarahkan pada manifestasi konflik daripada sebab-sebab konflik. Dengan asumsi konflik tidak akan dapat diselesaikan dan dibasmi, maka konflik harus diatur (dikelola) agar tidak mengakibatkan perpecahan masyarakat.

Konflik dalam kaitannya dengan status dan peranan DPRD, bisa berbentuk segi tiga yakni secara internal dalam Dewan, dengan eksekutif, dan dengan masyarakat. Untuk mengelola konflik yang telah (akan) terjadi perlu dibahas secara intensif dalam peraturan tata tertib DPRD. Himbauan bagi anggota Dewan, bahwa perbedaan dan konflik merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Ingat, bahwa dunia diciptakan dengan berbagai hal yang berbeda. Yakinkan diri kita sebagai anggota Dewan tentang hal itu. Jangan pernah memaksakan diri dan pihak lain untuk meleburkan perbedaan-perbedaan itu menjadi sama. Itu sangatlah tidak mungkin. Yang diperlukan hanyalah kedewasaan diri menerima kenyataan bahwa perbedaan itu ada dan tidak perlu memperlmasalahkannya. Sekali saja kita terobsesi untuk memaksa pihak lain menerima dan menuruti kehendak kita, maka sudah memancing terjadinya konflik. Semua orang memiliki kemauan masing-masing. Ego yang memuncak akan memperparah keadaan.

Dunia tercipta serba berseberangan, ada siang ada malam, ada laki-laki ada perempuan, ada baik ada buruk, ada senang ada susah, dst. Dengan melihat perbedaan tersebut apa adanya, kita akan terhindar dari obsesi yang meruntuhkan. Terimalah perbedaan dengan bijaksana, niscaya kita akan mendapatkan pemahanan dan pada akhirnya kita mampu memanfaatkan perbedaan-perbedaan tersebut dengan maksimal. Kita akan mengubah perbedaan tidak lagi menjadi ancaman tetapi menjadi peluang yang menguntungkan. Yang pasti jika kita menginginkan tim kita bekerja dengan hasil

terbaik, maka pilihlah orang-orangnya dengan karakter berbeda-beda. Kita tidak akan mendapatkan hasil apapun jika kita memilih anggota tim kerja semuanya memiliki karakter sama. Kita harus memiliki pihak yang sanggup memimpin, pihak yang suka menjadi oposan, pihak yang gila kerja (pelaksana), pihak perencana, dsb. Di sinilah perbedaan akan bekerja dengan selaras dan mengasilkan hal tertentu.

Konflik dan prosesnya diibaratkan dengan bisul. Konflik bermuara dari perasaan yang tidak selaras. Perasaan ini kita anggap seperti bisul, semakin dipendam semakin membesar dan menyakitkan. Yang harus dilakukan adalah dengan mengempeskan bisul tersebut. Tusuklah “si bisul” sehingga isinya keluar semua tanpa ada sisa. Tentu saja semakin besar bisul, semakin kuat ledakannya.

Biarkan semua orang mengeluarkan unek-uneknya, berilah kesempatan agar semua pihak dalam tim mengekspresikan perasaannya yang terpendam. Buatlah semacam forum atau media agar semua orang merasa nyaman menyampaikan pendapatnya. Jika sebagai seorang pemimpin dalam tim, tentu akan lebih mudah menciptakan media tersebut. Tetapi jika hanya sebagai anggota tim, bijaksanalah agar si pemimpin tetap dapat menyelamatkan muka, kecuali sudah merasa sangat tertekan dan pimpinan sepertinya tidak memiliki ketrampilan mendengar, maka bersuara dengan lantang adalah pilihan berikutnya. Frekuensi pemecahan bisul akan menentukan sebesar apa letupannya. Semakin sering dikempeskan tentu bisul tidak menjadi besar dan letupannya akan kecil. Jika bisul tidak pernah dipecahkan dan besar, maka bersiap-siaplah akan terjadi letupan yang keras dan mengguncangkan.

Usahakan agar konflik terjadi hanya sebatas kepala saja. Ada orang bijak yang mengatakan “*compete between ideas but cooperate between people*” (maksudnya: bersainglah dalam ide-ide tetapi bekerjasamalah antar orang). Mungkin kata bijak ini terlalu ideal dan kurang realistis, tetapi begitulah adanya. Konflik sebesar apapun seyogyanya sebatas

ide-ide tetapi tidak dalam pelaksanaan kerjanya. Inilah yang orang sebut dengan menyimpan konflik sebatas kepala saja. Pikiran boleh panas tetapi hati tetap jernih. Jika tidak demikian, perang besar pasti tidak terhindarkan.

Konflik yang tercipta bisa berupa konflik pribadi atau konflik fungsional. Konflik pribadi terjadi pada individu-individu dalam tim. Picunya seperti telah kita bahas di atas. Alam semakin parah jika perasaan terlibat. Situasi konflik individu sangat tidak efisien untuk kerja karena mereka cenderung tidak mau berhubungan satu dengan yang lainnya. Jika anggota (pegawai) A terlibat konflik dengan anggota B, dan kita menitipkan sebuah (pesan) surat kepada anggota A untuk diberikan kepada anggota B maka sudah pasti tidak akan segera sampai, karena paling tidak anggota A akan minta tolong anggota lain untuk menyampaikannya kepada anggota B.

Ada juga konflik fungsional. Konflik ini bisa disebut konflik antar bagian yang muncul lewat pembagian tugas dalam struktur DPRD. Mungkin komisi A tidak sependapat dengan komisi B, komisi A tidak sependapat dengan komisi C, dan seterusnya.

Kedua jenis konflik tersebut masih bisa dinetralisir jika kedua belah pihak menyadari adanya saling ketergantungan antara komisi yang satu dengan yang lainnya dan melihatnya dengan dewasa. Tidak ada komisi yang sangat penting melebihi komisi lain, semuanya sama dalam satu kesatuan. Bila tidak ada upaya saling membuka diri, memberi dan menerima maka konflik akan terus berkembang. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa konflik tidak perlu dihindari, tetapi nikmati saja. Tentu saja akan lebih nikmat jika konflik dilihat dengan kaca mata jernih. Lihatlah apa adanya jangan dipersepsikan atas hitam putih, benar-salah.

Sebenarnya ada dan tidaknya konflik sangat tergantung dari kultur organisasi dan selera pimpinan. Pimpinan sangat berperan mendisain suasana organisasi. Pada akhirnya sebuah konflik yang sengaja dibuat

atau tidak sengaja dibuat, harus juga diselesaikan agar tidak mengganggu operasionalisasi organisasi. Di sinilah kepiawaian pimpinan dituntut. Pemecahan masalah bisa sederhana dan bisa juga sulit tergantung pertimbangan tingkat kepentingan anggota tim dan kepentingan organisasi. Memang ada sedikit kesulitan, jika konflik bermain dalam hal pribadi, misalnya konflik keluarga, sirik-sirikan, lomba cari muka, dll.

Pemimpin yang tidak tanggap dan tidak cermat untuk bermain dalam konflik akan menjadi bulan-bulanan konflik anggotanya. Pemimpin yang demikian biasanya tidak akan mampu bertahan duduk berlama-lama di kursinya. Patokan selesainya sebuah konflik pada ujungnya adalah pada sisi perasaan mereka yang terlibat konflik. Orang kebanyakan menyebutnya dengan *win-win solution* yang boleh diterjemahkan masing-masing pihak harus sama-sama puas. Dendam dan iri atau apapun sejenisnya mesti disingkirkan jauh-jauh. Jika tidak, maka konflik akan terus berkembang, bahkan bisa menjadi warisan turun temurun.

Taktik menyelesaikan konflik lagi-lagi sangatlah unik dan pribadi. Semuanya tergantung kejelian dan pendekatan orang per orang. Yang pasti, siapapun yang berhasil keluar dari konflik akan tumbuh kepercayaan dalam dirinya. Pengalaman yang dialaminya akan memperkaya jam terbangnya dalam kasus hubungan antar manusia, khususnya dalam organisasi seperti Dewan.

Bentuk bentuk pengaturan konflik yang paling mungkin dilakukan oleh anggota Dewan adalah:

1. Bentuk konsiliasi seperti parlemen atau kuasi-parlemen dalam mana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak.
2. Bentuk mediasi, dalam mana kedua pihak sepakat mencari nasehat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa tokoh, ahli, atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki

- pengetahuan dan keahlian yang mendalam mengenai hal yang dipertentangkan, tetapi nasehat yang diberikan mediator itu tidak mengikat mereka).
3. Bentuk arbitrase, dalam mana kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal) sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator. Pengadilan atau lembaga-lembaga arbitrase lainnya dapat dipilih sebagai arbitrator.

F. Teknik Negosiasi

Sifat dan perilaku individu atau kelompok yang cenderung kurang terbuka dan bahkan cenderung tertutup terhadap individu atau kelompok lain menjadi sumber dampak potensial terjadinya konflik antar individu atau kelompok. Kedua individu atau kelompok ini selanjutnya disebut sebagai pihak-pihak terlibat konflik.

Bobot atau tingkatan konflik biasanya berawal dari konflik dengan bobot yang ringan. Namun konflik sebagai dampak ternyata memiliki sifat kumulatif sejalan dengan perjalanan waktu. Artinya, suatu konflik dengan bobot kecil jika tidak segera diselesaikan akan berkembang menjadi konflik dengan bobot yang lebih berat. Upaya untuk menyelesaikan konflik bukanlah hal mudah sehingga diperlukan seorang fasilitator. Untuk menjadi fasilitator juga bukanlah hal yang mudah, minimal memiliki tiga sifat utama yakni (1) menguasai bidang permasalahan yang menjadi sumber konflik, (2) tidak memihak atau netral, dan (3) sensitif atau memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap kepentingan masing-masing pihak maupun kepentingan bersama berbagai pihak yang terhimpun dalam sebuah sistem DPRD.

Walaupun seorang fasilitator telah memiliki ketiga sifat utama itu, tetapi masih diperlukan individu sebagai pihak lain yang dapat ditempatkan sebagai mitra fasilitator. Individu-individu atau pihak lain ini adalah juga memiliki kapasitas yang serupa dengan fasilitator.

Peranan individu-individu ini adalah secara informal memberi masukan kepada fasilitator dalam hal penyelesaian konflik yang sedang terjadi. Masukan-masukan ini sangat diperlukan fasilitator sebelum ia mempertemukan pihak-pihak yang terlibat konflik dalam rangka penyelesaian konflik. Peranan fasilitator sendiri adalah sebagai negosiator atau penasihat dalam penyelesaian konflik yang sedang terjadi.

Ditinjau dari sifat kumulatif konflik, maka penyelesaiannya dapat dilakukan secara dini. Konflik dengan bobot ringan masih lebih mudah untuk diselesaikan dibandingkan dengan konflik berat. Berdasarkan uraian ini, konflik dapat diselesaikan melalui upaya negosiasi. Suatu negosiasi yang dilakukan bertahap oleh seorang fasilitator yang berfungsi sebagai negosiator dalam penyelesaian konflik. Negosiasi dapat dilakukan melalui tiga tahapan pokok seperti di bawah ini.

- 1. Pendekatan Negosiator kepada Masing-masing Pihak yang Terlibat Konflik.** Pendekatan dimaksudkan agar negosiator memahami benar akar permasalahan menurut versi masing-masing pihak yang terlibat konflik. Upaya pendekatan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang dirancang sebagai proses sistematis sebagai berikut : (1) negosiator perlu terlebih dahulu menyampaikan kepada masing-masing pihak tentang kepeduliannya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, (2) negosiator perlu menjelaskan kembali kepada masing-masing pihak tentang tujuan akhir Dewan sebagai tujuan bersama anggota dan pimpinan Dewan, (3) negosiator perlu menjelaskan kembali tentang peranan masing-masing pihak dalam rangka mencapai tujuan akhir Dewan, (4) beri kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menjelaskan secara jujur tentang bagaimana sesungguhnya konflik terjadi, (5) buatlah kesepakatan bersama untuk menyelesaikan konflik melalui dialog antar pihak terlibat konflik, dengan ikut menghadirkan berbagai individu atau pihak lain yang bersifat independen dan memiliki kepedulian tulus terhadap konflik yang sedang terjadi.

2. **Brainstorming antar Negosiator dan Individu Mitra.** Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan dari berbagai individu berkompeten sebagai mitra negosiator tentang penyelesaian konflik berdasarkan versi masing-masing pihak terlibat konflik. *Brainstorming* dirancang menjadi sebuah acara dengar pendapat tentang bagaimana sesungguhnya konflik bisa terjadi menurut versi masing-masing pihak, dan bagaimana penyelesaiannya secara adil. Prosesnya adalah : (1) penyampaian laporan negosiator tentang kejadian konflik menurut versi masing-masing pihak, (2) tanggapan setiap individu mitra negosiator tentang kejadian konflik menurut versi masing-masing pihak, dan (3) kesimpulan sementara tentang duduk permasalahan sebenarnya, dan bagaimana posisi masing-masing pihak secara adil.
3. **Dialog Terbuka di Antara Pihak Terlibat Konflik.** Tujuan dialog terbuka dimaksudkan untuk mendapatkan kesepakatan bersama tentang berakhirnya konflik yang sedang berlangsung. Dialog dirancang sebagai sebuah pertemuan sistematis untuk mengakhiri konflik, sebagai berikut : (1) negosiator terlebih dahulu perlu menghimbau kepada masing-masing pihak untuk berfikir positif dan berempati, (2) masing-masing pihak menyampaikan berbagai hal yang dinilainya sebagai akar permasalahan secara jujur dan proporsional, (3) penyampaian pandangan negosiator tentang bagaimana sesungguhnya konflik terjadi, dan (4) diskusi dengan dipandu oleh negosiator, (5) pernyataan bersama pihak terlibat konflik tentang berakhirnya konflik, dengan difasilitasi oleh negosiator.

BAB VI BAGAIMANA MENYIAPKAN KUNJUNGAN LAPANGAN

Penyiapan kunjungan lapangan dimaksudkan sebagai alat yang dapat digunakan Dewan dalam melakukan kunjungan atau anjingsana ke konstituen. Pertanyaan-pertanyaan dasar dalam bab ini diharapkan dapat membantu DPRD membuat catatan sendiri dalam memfokuskan kunjungan yang akan dicapai di lapangan, serta untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan kunci dalam diskusi dengan konstituen. Catatan pegangan “etika” perlu diperhatikan untuk mengingatkan bahwa seorang anggota DPRD akan berada pada komunitas konstituen yang berbeda dalam budaya dan adat istiadat. Tidak diperhatikannya pola kebiasaan yang berbeda, akan dapat menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak diinginkan Dewan. Catatan pegangan ini juga menuntun bagaimana persiapan kunjungan dilakukan, mulai dari persiapan materi sampai dengan persiapan logistik dan informasi, serta proses pelaporan sebagai keluaran dari kunjungan.

Pertanyaan dasar “*mengapa pergi?*” akan membantu Dewan yakin bahwa perjalanan dan kunjungan lapangan akan mempererat hubungan dengan konstituen, mengumpulkan aspirasi dan mengartikulasikan kepentingan konstituen. Alasan dasar mengapa kunjungan ke lapangan diperlukan, selain digunakan untuk lebih mengenal dan mendalami persoalan konstituen, adalah untuk membina hubungan yang baik antara Dewan dan masyarakat dalam pemikiran bersama konsep dan kebijakan pelayanan publik, serta implementasinya; berbagi pengalaman dan pemahaman tugas dan fungsi Dewan; mengembangkan komitmen untuk pendekatan baru dan perkawanan dalam membangun jaringan kerja DPRD.

Oleh karena itu kunjungan Dewan sebaiknya dapat difokuskan pada topik dan aspek yang jelas. Penggalan informasi dapat

dilakukan melalui dialog, diperdalam dalam diskusi interaktif yang spesifik, pengayaan tanya jawab dengan menggunakan perspektif ke depan dan menumbuhkan pemahaman bersama dari sudut yang berbeda. Kunjungan juga akan memperjelas apa yang terjadi dalam proses praktik-praktik kebijakan dengan konstituen, pemahaman terhadap persoalan mereka dan tujuan akhir dari praktik-praktik kebijakan tersebut, untuk mendapat inspirasi dan inisiatif baru.

Pertanyaan dasar “*siapa?*” adalah pertanyaan penghubung Dewan dengan konstituen di lapangan. Informasi tujuan kunjungan Dewan sebaiknya dapat disampaikan kepada masyarakat terlebih dahulu. Informasi tujuan dan topik apa yang hendak didiskusikan akan membantu masyarakat mempersiapkan kunjungan. Begitu pula dengan informasi siapa dan kelompok atau segmen apa saja yang akan dikunjungi merupakan informasi yang sangat penting diperoleh Dewan. Sehingga terdapat arus informasi Dewan dan masyarakat yang akan dikunjungi.

Penentuan waktu kunjungan merupakan salah satu persiapan yang tidak mudah. Mensinkronkan waktu Dewan dan waktu masyarakat yang akan dikunjungi sangat penting untuk mendapatkan waktu yang ideal bagi kedua belah pihak. Kunjungan yang mengikutsertakan pejabat tertentu akan menjadi kalender masyarakat, yang kadang tidak bisa menghindari tuntutan protokoler yang baku. Kunjungan sebaiknya menghindari sejauh mungkin hari libur dan hari besar agama, serta musim-musim yang akan mengganggu jalannya kunjungan. Musim-musim ekstrim seperti hujan dan kemarau, sebaiknya dihindari karena akan menjadi kendala utama pelaksanaan kunjungan. Tekanan musim ini juga menjadi kendala masyarakat, karena harus mempersiapkan akomodasi dan transportasi yang cukup berat, serta persiapan kesehatan dan prosedur penanganan kecelakaan yang dimungkinkan akibat tekanan musim yang ekstrim. Bagaimanapun hal ini juga akan berkaitan dengan perhitungan anggaran yang dipastikan akan lebih besar pada musim-musim yang ekstrim.

Banyak hal yang akan disampaikan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat, tentu saja diharapkan informasi yang lengkap dari semua sisi, yaitu kekurangan, kelebihan, kendala, faktor pendorong, dampak positif maupun negatif dan hal-hal lainnya. Sebaiknya mendengar lebih banyak terhadap apa yang disampaikan dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan aspirasi kelompok bukan individu, serta memformulasikan pertanyaan kunci yang sesuai dengan kondisi yang sedang dijabarkan.

A. Persiapan Kunjungan dan Agenda Pertemuan

Analisis Situasi

Analisis situasi adalah langkah pertama dalam proses logis merancang sebuah kunjungan. Ini merupakan analisis ‘gambar keseluruhan’ atau konteks bagi kunjungan yang akan dilakukan, termasuk identifikasi penyebab timbulnya masalah yang ingin diselesaikan melalui kunjungan. Disamping itu, analisis situasi juga dapat menguji asumsi-asumsi yang menjadi dasar hubungan sebab-akibat permasalahan yang ingin diatasi.

Berdasarkan analisis situasi, kita bisa menilai apakah kunjungan lapangan diperlukan. Dengan kata lain, sebelum kita bersusah payah menghabiskan tenaga, waktu dan uang untuk merancang dan melakukan suatu kunjungan, ada gunanya melakukan penilaian kritis tentang tepat atau tidaknya kunjungan dilakukan.

Bagaimana melakukan analisis situasi?

Ada banyak cara melakukan analisis ini. Berikut beberapa hal yang dapat menjadi panduan umum proses analisis:

1. Pengamatan dan refleksi. Kita harus bertanya pada diri kita, apa yang sedang terjadi. Kita harus mulai secara tepat menggambarkan situasi dimana kunjungan akan dilangsungkan.
2. Klarifikasi. Dari penggambaran di atas, kita ingin mengidentifikasi isu-isu apa saja yang terkait dalam hal ekonomi, politik, nilai dan budaya setempat.

3. Keterkaitan. Bagaimana hal-hal tersebut saling berkaitan? Kita harus menempatkan semua fakta yang ada secara bersama-sama dalam gambaran yang besar.
4. Pendalaman. Kita melihat hubungan-hubungan yang ada, dan mencoba mencari apa saja yang menjadi sebab dan apa akibatnya? Bagaimana semuanya saling berkaitan? Apa yang penting dan tidak penting?
5. Interpretasi. Mencari cara-cara untuk memungkinkan terjadinya perubahan dan peran apa yang bisa dimainkan. Ada banyak alat untuk menganalisis situasi, seperti analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities & threats*) atau analisis KELAPA (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dan pohon masalah atau *problem tree*.

Terakhir, tetapkan fungsi yang dapat diperankan oleh kunjungan ini.

B. Merumuskan Tujuan Kunjungan Lapangan

Satu tujuan kunjungan kepada konstituen adalah uraian mengenai suatu pencapaian – pemahaman, tindakan penyelesaian masalah, perasaan, sikap/dukungan – yang Anda harap akan bisa dicapai di akhir pertemuan.

Mengapa harus merumuskan tujuan pertemuan ?

- Tujuan adalah dasar dari setiap perancangan agenda. Jika tujuan tidak jelas, maka dasar untuk memilih atau merancang isi dan metode, juga tidak kuat.
- Tujuan bisa digunakan untuk menguji hasil. Alasan kedua mengapa tujuan perlu didefinisikan dengan tajam adalah untuk mengetahui apakah kita sudah mencapai hasil yang diinginkan atau belum. Jika Anda tidak tahu mau pergi ke mana, bagaimana Anda tahu bahwa Anda sudah tiba?
- Tujuan memberi arah yang jelas bagi konstituen. Tujuan yang baik dapat memberi gambaran kepada mereka mengenai apa

yang sedang berlangsung. Dengan tujuan yang jelas, konstituen akan berpartisipasi dalam proses diskusi dengan lebih baik; mereka tidak perlu menebak apa yang akan dihasilkan.

Bagaimana cara merumuskan tujuan secara spesifik?

Satu tujuan pertemuan yang berguna bisa menjawab tiga pertanyaan berikut:

1. Pencapaian: apa yang ingin dicapai, dukungan? Solusi masalah?, peningkatan kesadaran?, kesepakatan ?
2. Kondisi: dalam kondisi seperti apa, tujuan dapat tercapai?
3. Kriteria: sebaik apa hal itu harus dilakukan?

Ingat, dalam menulis tujuan pertemuan, harus **SMART**.

Boks 4: Teknik Merumuskan Tujuan

S	<i>Specific</i> (spesifik)	Tujuan harus betul-betul spesifik dalam menjelaskan apa yang Anda inginkan dari konstituen. Kesadaran, dukungan, kesepakatan, solusi, informasi/data ?
	<i>Shared</i> (bersama)	Tujuan tidak hanya memandu anggota Dewan, tetapi juga berfokus pada proses menjawab permasalahan konstituen, karenanya harus diberitahukan kepada mereka sejak awal
M	<i>Measurable or observable</i> (terukur)	Jika tujuan tidak terukur atau tidak bisa diamati maka tujuan tidak bisa dimonitor atau dievaluasi dan karenanya tidak berguna. Itu juga menunjukkan bahwa tujuan yang dirumuskan, kurang spesifik
A	<i>Attainable or Achievable</i> (bisa dicapai)	Anda harus tetap mengingat latar belakang konstituen, ketika menulis tujuan pertemuan. Anggota Dewan dan Konstituen harus bisa mencapai tujuan pertemuan yang tertulis
R	<i>Result oriented</i> (hasil)	Tujuan harus berorientasi hasil, yang mengungkapkan hasil dari proses kunjungan
	<i>Realistic</i> (realistis)	Ketika menulis tujuan, pertimbangkan semua keterbatasan praktis seperti keterbatasan waktu, dana, dll
T	<i>Time bound</i> (terikat waktu)	Suatu tujuan harus menyebutkan kapan suatu tujuan tercapai. Misalnya: (1) pada akhir ... konstituen ...dst

C. Persiapan Agenda Kunjungan

Mengembangkan Agenda Kunjungan

Mengapa peduli?

Tujuan agenda kunjungan adalah untuk membuat satu ‘rencana utama’ atau *master plan*. Agenda kunjungan adalah alat yang sangat praktis karena Anda akan memiliki gambaran yang jelas, sehingga memungkinkan Anda untuk:

- Memeriksa apakah rencana kunjungan memiliki satu alur logis dalam periode minggu, hari dan jam per jam.
- Memeriksa apakah tujuan kunjungan tercapai dalam waktu yang disediakan.
- Menilai variasi metode diskusi/dialog dan pengumpulan informasi yang dibutuhkan.
- Menilai apakah pembagian waktu cukup layak atau tidak.
- Berbagi rancangan dengan anggota Dewan lain, sehingga mereka bisa menyiapkan diri dengan lebih baik.

Apakah Agenda Dewan?

Agenda Dewan bisa dibuat sangat detail, dengan menyertakan tujuan dari setiap topik isu dan waktu, dan hanya digunakan untuk anggota. Satu agenda Dewan yang dirancang baik harus:

- Bertujuan untuk mencapai tujuan kunjungan atau sesuai dengan keperluan permintaan konstituen yang sudah teridentifikasi.
- Menggunakan satu variasi metode dan teknik partisipatif.
- Layak untuk dicapai, baik dari segi waktu maupun ketersediaan sumber daya.
- Cukup fleksibel untuk mengakomodasi keperluan spesifik, atau perubahan yang diperlukan.
- Menyediakan cukup waktu untuk membuka dan menutup setiap waktu tertentu, untuk mengingatkan, untuk menyegarkan, untuk merumuskan, mengaitkan dan menyediakan kesempatan untuk umpan balik.

Mengapa merancang satu agenda pertemuan sangat menantang?

Merancang harus menjadi tugas paling menantang. Tetapi orang pada umumnya tidak mengetahui di mana harus mulai, bagaimana berproses atau tidak merasa perlu untuk merancang pengalaman dialog yang efektif. Fase perancangan pertemuan menantang, karena memerlukan:

- Pengetahuan mengenai berbagai pilihan rancangan yang tersedia.
- Ketrampilan dalam menggunakannya.
- Kreatifitas dalam memanipulasi berbagai pilihan untuk memperkuat keterlibatan konstituen dan membuat proses pertemuan yang efektif.
- Untuk melihat gambaran keseluruhan sambil menangani detail setiap momen pertemuan.
- Kepercayaan diri yang memungkinkan Anda untuk kreatif dan berani mengambil risiko.
- Fleksibilitas dan terbuka untuk melakukan perubahan jika terjadi sesuatu di luar rencana.

Salah satu tugas dalam menyusun agenda adalah mengurutkan acara. Proses mengurutkan acara ini merupakan campuran dari berbagai komponen, dimana sebagian adalah logika, sebagian pengalaman, sebagian intuisi dan sebagian akal sehat yang baik. Mengurutkan, atau memutuskan apa yang muncul selanjutnya, merupakan kepedulian mikro maupun makro. Agenda adalah alat untuk bekerja dari makro turun ke tingkat mikro.

Bagaimana mengembangkan satu agenda pertemuan?

Ada banyak jalan untuk mengurutkan agenda pertemuan, yang belum tentu terbaik bagi setiap anggota DPRD sebagai fasilitator. Setiap individu mempunyai caranya sendiri-sendiri.

Berikut ini adalah pendekatan yang disarankan:

1. **Prioritaskan** dan **pilih** keperluan pertemuan. Suatu rancangan akan memiliki risiko tertinggi apabila program

- dirancang terlalu padat.
2. Setelah memilih, mulailah **mengurutkan** topik/ persoalan berdasarkan waktu yang tersedia. Satu cara mengurutkan adalah dengan menemukan kerangka utama dari alur keseluruhan pertemuan Anda. Satu kerangka utama akan membantu Anda untuk merancang satu alur logis dan membantu Anda untuk mengaitkan setiap kegiatan selama proses di lapangan. Selain itu, bagi konstituen, kerangka utama akan membantu untuk membangun solusi yang logis. Pendekatan pengurutan yang biasa dilakukan adalah:
 - dari umum ke spesifik.
 - dari kongkrit ke abstrak.
 - dari yang diketahui ke yang tidak diketahui.
 - dari sederhana ke yang lebih kompleks.
 - mengikuti satu organisasi atau proses logis yang sudah ada; sebagai contoh adalah siklus perencanaan proyek.
 - mengikuti aturan penampilan pekerjaan; sebagai contoh membuat satu pembibitan.
 3. **Tulis waktu**, isu/permasalahan, tujuan dan bahan-bahan untuk setiap isu satu agenda.
 4. **Ulas** dan lebih baik lagi diskusikan agenda pertama Anda untuk memastikan bahwa:
 - Programnya tidak berlebihan.
 - Mempertimbangkan waktu: periode istirahat setelah makan siang, hari keempat dalam minggu, perasaan Jumat sore dll.
 - Kesempatan untuk *refreshing* dan bergembira disertakan seperti, pembuka, kesenian, musik, permainan dan pergerakan
 - Aktifitas yang lebih 'serius' jangan diletakkan di awal pertemuan.
 - Dukungan bahan untuk setiap isu, seperti data hasil analisis situasi, foto, keterangan-keterangan data sekunder dari media massa, hasil penelitian, dll.

Mengembangkan satu agenda pertemuan:

1. Langkah pertama adalah menulis semua kebutuhan rencana

- kunjungan atau topik-topik.
2. Langkah berikutnya adalah kerangka utama, dengan mengurutkan keperluan pertemuan.
 3. Selanjutnya, masukkan urutan topik yang sudah dirancang, ke dalam waktu kunjungan, sesuaikan dengan jumlah hari. Mulailah dengan gambaran umum, lalu fokus pada satu minggu, lalu pada satu hari, dan terakhir, bagi kunjungan per jam. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan menggambar tabel jadwal kunjungan Anda di kertas, dan Anda menempelkan *post-it* dan bisa memindah-mindahkannya agar bisa menghasilkan urutan yang paling logis. Ketika melakukannya, mungkin Anda akan mengkaji ulang langkah pertama dan kedua, dan menanyakan kembali, apakah topik yang dipilih betul-betul penting? Apakah proses ini adalah proses yang terbaik? Apakah kita membutuhkan waktu yang lebih lama?
 4. Setelah Anda puas dengan alur secara umum, maka sekarang waktunya untuk mengisi setiap sesi dengan lebih detail. Tulislah waktu yang diperlukan, apa topiknya, apa tujuannya, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk setiap sesi. Anda bisa menggunakan format pada halaman selanjutnya.

Tabel 1: Contoh Agenda Pertemuan Konstituen

Waktu	Isu/Permasalahan	Metode	Tujuan	Bahan

Tabel 2: Contoh Isian Rekapitulasi Rencana Kunjungan

Apa	Siapa	Dengan Apa	Bagaimana	Kapan	Berapa Banyak
Menyelesaikan analisis situasional					
Menyelesaikan Agenda kunjungan					
Mengumpulkan & analisis informasi awal					
Melaksanakan kunjungan					
Menganalisis data					
Menulis laporan					
Menyampaikan laporan					
Rencana Tindak lanjut					
Lain-lain					

D. Melaksanakan Kunjungan Lapangan Dewan

Pada bagian sebelumnya Anda telah melakukan persiapan kunjungan lapangan, diantaranya adalah:

- Membuat analisis situasi (mengetahui akar permasalahan, menganalisis, interpretasi).
- Merumuskan tujuan yang dapat dicapai pada kunjungan.
- Merancang dan menyusun agenda kunjungan.
- Menyiapkan daftar kebutuhan serangkaian skenario sesuai skenario agenda.

Dengan persiapan tersebut maka anggota Dewan telah siap melakukan kunjungan lapangan dengan dibekali informasi awal dan berbagai perlengkapan (kuesioner, metode, lokasi, jadwal, alat

pendukung, dll). Dengan bekal persiapan tersebut kunjungan telah terencana dengan baik, sehingga kepercayaan diri menjadi semakin baik untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi di lapangan. Selain kepercayaan diri, dengan mempersiapkan yang matang, berbagai permasalahan yang dihadapi konstituen telah terjawab sebelum kunjungan lapangan dilakukan. Kunjungan lapangan akan dapat menggali lebih dalam permasalahan dan solusinya.

Inti dari kunjungan lapangan anggota DPRD paling tidak adalah:

- Menyampaikan perkembangan pekerjaan anggota Dewan kepada konstituen, terutama menyangkut kepentingan konstituen di daerah kunjungan tersebut.
- Mengumpulkan data dan informasi, sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan.
- Monitoring terhadap program pemerintah daerah yang telah berjalan.
- Berbagi pengalaman, identifikasi masalah dan menemukan alternatif solusi yang mungkin.
- Membangun kepercayaan konstituen terhadap anggota Dewan;
- Kebutuhan spesifik DPRD lainnya.

Pada topik dibawah disajikan kiat-kiat bagaimana agar anggota Dewan dapat menjadi fasilitator dan melakukan komunikasi yang efektif ketika melakukan kunjungan lapangan.

E. Menilai Kapasitas Dewan sebagai Fasilitator

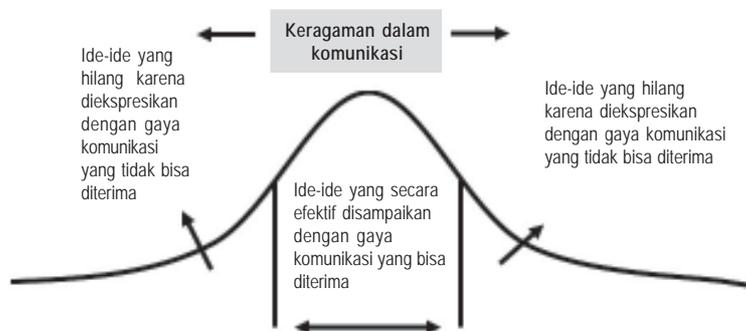
Apakah fasilitasi itu dan apa yang perlu difasilitasi?

Fasilitasi bisa digambarkan sebagai satu proses yang secara sadar dilakukan untuk membantu satu kelompok agar sukses mencapai tujuan dan fungsinya sebagai satu kelompok. Proses-proses yang perlu difasilitasi adalah :

- Proses saling belajar.
- Proses-proses partisipasi, *sharing* dan dinamika kelompok.

Bagaimana fasilitasi membantu terjadinya proses sharing yang efektif dan proses pemahaman bersama ?

Dalam suatu pertemuan, biasanya banyak ide dan pengalaman yang dilontarkan atau diceritakan. Namun, seringkali hanya beberapa yang mendapat perhatian sementara yang lainnya hilang seolah-olah tidak pernah dikatakan. Kenapa hal ini terjadi? Diagram berikut mengilustrasikan masalah tersebut:



Gambar 2: Pengaruh Keragaman Komunikasi terhadap Ide yang Dapat Diterima

Prinsipnya adalah: satu ide yang diekspresikan dengan gaya komunikasi yang bisa diterima akan ditanggapi secara lebih serius oleh lebih banyak orang. Ide-ide yang diekspresikan secara buruk atau mengancam akan lebih sulit didengar peserta. Sebagai contoh, banyak peserta tidak sabar dengan peserta yang sangat pemalu atau gugup dan bicara dalam kalimat terpatah-patah, atau yang tidak menguasai bahasa dengan baik. Tidak jarang dijumpai, ada kelompok benar-benar ingin menyuarakan opini, berbagi pandangannya, saling mendengarkan pengalaman dan memunculkan ide-ide baru yang menarik. Namun, hal itu dibatasi oleh kemampuan menerima gaya komunikasi yang berbeda, sehingga ruang lingkup dan kekayaan informasi, pengetahuan dan pengalaman hasil sharingnya menjadi terbatas.

Dalam contoh dan ilustrasi berikut digambarkan bahwa walaupun ada ide-ide yang hilang, akan lebih banyak ide-ide yang dibagi (*di-share*) apabila kita memperluas batas gaya komunikasi yang bisa diterima. Dengan menggunakan teknik fasilitasi yang baik, seorang Dewan (fasilitator) bisa menjadi pendukung untuk kelompok seperti itu. Sebagai contoh:

- Ketika seseorang mengulang-ulang perkataannya sepanjang waktu, seorang fasilitator bisa meringkaskan perkataannya untuk membantunya berpikir.
- Seorang fasilitator bisa membantu mereka yang bicara dalam kalimat terpatah-patah dengan memperlambatnya dan menggali gagasan yang ingin disampaikan.
- Seorang fasilitator bisa mengulang satu ide dari seorang peserta yang malu agar menjadi perhatian semua orang.
- Seorang anggota Dewan sebagai fasilitator bisa melakukan interupsi dengan tegas dan baik apabila ada topik yang berbeda dengan topik yang sedang didiskusikan. Namun fasilitator menjanjikan kepada pembicara bahwa pada akhir diskusi, topik tersebut dapat didiskusikan tersendiri.

Bagaimana fasilitasi membantu proses partisipasi dan dinamika kelompok?

Proses untuk menemukan apa yang terjadi dalam satu kelompok disebut mendiagnosis. Itu adalah suatu ketrampilan penting bagi seorang fasilitator. Seorang fasilitator hanya bisa menghindari atau menghilangkan masalah jika dia bisa mendiagnosis apa yang terjadi.

Dalam diagnosis terkandung pemahaman tentang penyebab masalah yang diperoleh setelah mencari petunjuk:

- Dari dalam kelompok, misalnya pola komunikasi, *babasa tubuh*
- Di luar kelompok, misalnya sejarah, hubungan masa lalu antara anggota, hierarki. Beberapa contoh yang bisa diungkap di sini adalah:

Boks 5: Mendiagnosis Masalah Komunikasi Kelompok

Masalah	Kemungkinan penyebab
Setiap orang tidak berpartisipasi atau menunjukkan ketertarikan dan sebagian diam	Peran tidak jelas untuk setiap orang
	Beberapa peserta merasa tidak aman
Peserta tetap pada pandangan yang saling bertentangan, menghambat proses atau pengambilan keputusan	Beberapa peserta mendominasi berdasarkan pendidikan, kelas atau seks
	Adanya nilai-nilai yang berbeda jauh lebih tinggi ketimbang tujuan pertemuan
Beberapa peserta mengabaikan atau tidak mempedulikan kontribusi dari peserta lain	Adanya perbedaan/konflik antara individu yang ada sebelum keberadaan kelompok
	Peserta tidak sensitif terhadap kebutuhan dan masukan dari yang lain
Kelompok tidak bisa mengambil keputusan, atau tidak ingin melaksanakan keputusan	Peserta terlalu mementingkan diri sendiri
	Peserta tidak memiliki cukup informasi atau ketrampilan untuk memecahkan masalah
	Keputusan mengancam peserta
	Takut salah

Bagaimana fasilitasi membantu pertemuan efektif ?

Ketika kita memfasilitasi proses partisipasi, *sharing* dan dinamika kelompok maka fokus fasilitator pada *bagaimana* dan prosesnya. Sedangkan memfasilitasi proses diskusi, fokusnya pada *apa-nya*.

Boks 6: Kiat Memfasilitasi Kelompok

Ketika presentasi	Perjelas tujuan
	Kelompok, struktur dan kecepatan sesuai dengan yang perlu didiskusikan
	Sebanyak mungkin gambarkanlah
	Hubungkan dengan yang sudah konstituen ketahui
	Hubungkan dengan realitas kerja konstituen
Ketika mendorong <i>Sharing</i>	Cari kesamaan dan perbedaan
	Tetap pada jalur
	kuti seluruh diskusi
	Rumuskan poin-poin penting
	Tantang dengan pemikiran hitam putih
	Dapatkan nilai-nilai saling belajar
Ketika mendorong penemuan	Perkuat eksplorasi dan eksperimen
	Perkuat untuk mencoba sesuatu yang baru
	Dampingi
Ketika mendorong penerapan	Kejelasan tugas
	Mengawasi kemajuan

Beberapa sikap dan ketrampilan yang diperlukan Dewan untuk menjadi fasilitator yang efektif

- Keterbukaan: kemampuan untuk mengundang dialog, menerima umpan balik, dan siap untuk menguji nilai-nilai Anda termasuk opini, serta kesiapan untuk merubahnya, jika perlu.
- Sensitif/empati: kemampuan mengambil pesan implisit; untuk melihat masalah melalui mata konstituen; untuk memahami perasaan, ide-ide dan nilai-nilai mereka; untuk fokus pada peran daripada sekedar hanya pada kepribadian atau kompetensi.
- Ketrampilan komunikasi dasar: kemampuan menyimak dan mengamati secara aktif, bertanya, menguji, menciptakan dialog, mengungkapkan dengan cara lain, memberi umpan balik,
- Mendiagnosis: kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan memilih cara dan waktu intervensi yang tepat.
- Mendukung dan mendorong konstituen (peserta): kemampuan untuk memberikan dukungan, apresiasi dan kepedulian baik secara verbal maupun non-verbal.
- Menantang: kemampuan untuk berlawanan, untuk tidak setuju, untuk menghentikan satu proses tanpa bersikap kasar.
- Mengelola konflik; kemampuan untuk menyelesaikan konflik melalui negosiasi dan mediasi.
- Memodelkan: kemampuan untuk menyertakan diri sebagai model dalam kelompok, menanggapi dengan spontan, tanpa menjadi idealis, bersikap sebagai pakar.

Tips untuk mengelola anggota kelompok yang sulit

Berikut ini adalah tipe-tipe anggota kelompok yang perilakunya bisa mengakibatkan kesulitan dalam kelompok, disertai pilihan tentang bagaimana mengelola mereka.

Pendam atau pemalu

Hargai peran serta apa pun sikapnya. Di luar kelompok semangat dia. Berikan umpan balik secara tersendiri. Beri waktu untuk

mempersiapkan suatu topik, dengan cara memberi tahu sebelumnya. Luangkan waktu. Berikan waktu. Bersabarlah. Undang untuk bicara atau uji pemahaman dari waktu ke waktu. Tempatkan dalam kelompok yang saling membantu.

Marah terhadap tugas atau mengecewakan orang lain

Periksa alasan. Berikan umpan balik. Sesuaikan dan ingatkan aturan kelompok. Beri tanggung jawab dalam kelompok. Hadapi perilakunya jika terjadi. Dukung/ perkuat perilaku lain. Berikan waktu di luar kelompok.

Agresif

Cari penyebabnya dan hilangkan jika mungkin. Berikan umpan balik. Rubah kelompok. Ingatkan kelompok tentang aturan. Hadapi perilakunya ketika terjadi dan perkuat perilaku lain ketika terjadi. Bentuk alternatif non-agresif. Diskusikan akibatnya dengan keseluruhan kelompok.

Terlalu dominan

Luangkan waktu. Berikan umpan balik. Catat tingkat keikutsertaan. Tempatkan dengan tipe-tipe lain yang semacam. Tempatkan dalam kelompok yang sama dengan fasilitator. Minta diam. Undang untuk ikut bertanggung jawab atas peran serta yang lain. Kembangkan sikap asertif terhadap orang lain.

Motivasi rendah atau malas

Periksa alasannya. Berikan peran dalam memilih tugas. Tawarkan pilihan kerja. Perkuat, semangati, dukung keikutsertaan. Berikan tanggung jawab. Tantang jika sesuai. Tempatkan bersama dengan kelompok inti yang memotivasi. Terima dan bersabarlah. Cari terus keterlibatan.

Pelawak

Diskusikan dalam kelompok mengenai kegunaan dan penyalahgunaan humor. Hadapi perilakunya. Berikan umpan balik

– beri waktu untuk berubah. Dukung perilaku yang berbeda dari yang ini.

Penyendiri

Selalu menerima. Berikan umpan balik jika sesuai. Berikan dukungan khusus. Alokasikan peran atau tanggung jawab khusus. Dukung – ciptakan kesempatan untuk meraih penghargaan.

F. Menciptakan Dialog

Apakah dialog itu?

Dialog adalah aliran informasi yang sangat bebas di mana peserta ikut bertanggung jawab.

Apakah perbedaan antara dialog dan diskusi?

Istilah dialog dan diskusi seringkali digunakan dimana saja, tergantung dari konteks atau situasi penggunaannya. Dalam hal ini, kita mendefinisikan diskusi dan dialog sebagai berikut:

Boks 7: Perbedaan Diskusi dan Dialog

Diskusi	Dialog
<ul style="list-style-type: none"> · Berdasarkan kompetisi · Bertanggung-jawab untuk mempengaruhi opini yang lain · Pikiran tertutup · Bicara · Pernyataan · Opini yang pasti · Mencari penyelesaian 	<ul style="list-style-type: none"> · Berdasarkan berpikir bersama · Bertanggung-jawab untuk memahami perspektif yang lain · Pikiran terbuka · Menyimak · Pertanyaan terbuka · Menguji Mencari penyelesaian terbaik

Kenapa dialog penting dalam pertemuan?

Dialog adalah perlu untuk:

- Menciptakan satu lingkungan saling percaya.
- *Sharing*.
- Menyelesaikan masalah secara efektif.
- Mencapai konsensus.

Bagaimana menciptakan dialog?

1. Perjelas tujuan *sharing* (jika diperlukan jelaskan perbedaan antara dialog dan diskusi).
2. Uji dan dukung pengujian oleh konstituen dengan informasi dan pemahaman.
3. Tantang ide-ide atau asumsi yang mapan.

G. Mendokumentasikan Hasil Pertemuan Konstituen**Bagaimana Anda mendokumentasikannya?**

Tata letak satu laporan sama dengan laporan setiap riset proyek dan proposal, seperti yang mungkin Anda lihat dari format berikut. Isi dari temuan lapangan dan analisis kelayakan adalah hal yang spesifik untuk satu laporan kunjungan. Format yang disarankan untuk satu laporan kunjungan:

- **Rasional**
Satu atau dua paragraf yang menyebutkan dan menjelaskan tujuan utama analisis kebutuhan kunjungan dan justifikasi kebutuhan kunjungan Dewan.
- **Uraian dan lingkup Kunjungan Lapangan**
Ini adalah tulisan tentang situasi dan cakupan kerja, penonjolan fokus dan penekanan pada kunjungan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ini bisa berhubungan dengan kerja keseluruhan atau merupakan bagian kritis dari pekerjaan.
- **Tujuan Kunjungan Lapangan**
Bagian ini menegaskan tujuan dari identifikasi kebutuhan kunjungan dan apa yang akan diselesaikan dengan kebutuhan ini.
- **Metode dan Teknik**
Bagian ini berisi daftar teknik yang dipergunakan dalam mengumpulkan data & informasi, pendalaman permasalahan, metode analisis dan kajian data informasi yang diperoleh. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana proses berlangsung.

- **Temuan-temuan**

Bab ini menampilkan hasil analisis konstituen, pemda, organisasi (DPRD) dan keterkaitan ketiganya dianalisis, baik dimensi kondisi, keterbatasan dan peluangnya. Akhirnya bab ini juga menjelaskan kebutuhan tindak lanjut.

- **Analisis Kunjungan**

Analisis kunjungan menampilkan kesimpulan dan rekomendasi menyangkut konteks kunjungan saat itu dan kegiatan tersebut kaitannya dengan tugas Dewan. Saran atau petunjuk mengenai intervensi atau pilihan bisa disertakan. Begitu juga cara memecahkan atau mengurangi masalah dan keterbatasan yang teridentifikasi dalam konteks. Analisis kunjungan harus menilai efektifitas kunjungan sebagai solusi masalah dalam konteks masa kini. Bab ini di akhiri dengan satu usulan pemecahan masalah, termasuk strategi yang disarankan, cakupan, jangka waktu dan perkiraan biaya.

BAB VII PENUTUP

Seperti telah disampaikan pada permasalahan dan tujuan buku ini disusun, terdapat ‘jarak’ antara rakyat (konstituen) yang berharap utusan mereka dapat mengusung aspirasi mereka pada keputusan-keputusan publik di sidang DPRD. Di pihak lain, masih banyak anggota Dewan yang merasa bahwa mereka sudah berusaha dengan gigih, namun tidak lagi mengerti bagaimana melakukannya dengan efektif. Dengan membaca dan mencoba menerapkan petunjuk buku saku ini diharapkan ‘jarak’ semakin menyempit dan hubungan antara anggota DPRD dengan konstituennya semakin dekat.

Dengan memahami buku saku ini dan secara berkala melakukan kunjungan lapangan untuk menjangkau aspirasi konstituen terkini diharapkan anggota Dewan (DPRD) dapat: Memiliki pengetahuan, dan ketrampilan tentang bagaimana membina hubungan dengan konstituen; mengerti prinsip-prinsip penting dalam pola hubungan; Memiliki ketrampilan bagaimana menjadikan konstituen sebagai bagian dari proses kinerja Dewan yang baik; Memperjuangkan kepentingan konstituen sebagai warga negara; Menjadi figur wakil rakyat yang memiliki intelektualitas tinggi, aspiratif, populer, dekat dan dicintai konstituennya.